



## EKONOMI DAN KEUANGAN

### 6.1. Industri, Perdagangan dan Pengembangan Usaha Nasional

Jenis industri di Kabupaten Sumbawa dibagi menjadi tiga bidang, yaitu Bidang Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan (IKAHH); Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka (ILMEA); serta Industri Menengah. Bidang IKAHH mencakup Industri Makanan dan Minuman, Industri Kayu dan sejenisnya, serta Industri Pulp, Kertas, dan Bahan Kimia dengan total 142 sentra industri, 3.702 unit usaha, dan 9.252 tenaga kerja. Bidang ILMEA mencakup Industri Aneka, Industri Tekstil, serta Industri Logam, Mesin, dan Alat Angkut dengan 48 sentra industri, 1.251 unit usaha, dan 1.720 tenaga kerja. Selanjutnya, Bidang Industri Menengah memiliki 10 sentra industri, 20 unit usaha, dan 432 tenaga kerja. Secara keseluruhan, terdapat 200 sentra industri, 4.973 unit usaha, dan 11.404 tenaga kerja.

Nilai industri dan investasi ditinjau dalam dua bidang industri yang berbeda, yaitu Bidang IKAHH dan Bidang ILMEA. Bidang IKAHH mencakup Industri Makanan dan Minuman, Industri Kayu, Rotan, Rumput, dan Sejenisnya, serta Industri Pulp, Kertas, dan Bahan Kimia. Nilai industri dan investasi tertinggi terdapat pada Industri Makanan dan Minuman dengan nilai industri sebesar 48.570.746 dan investasi sebesar 319.048.636. Sementara itu, Bidang ILMEA mencakup Industri Elektronika dan Aneka, Industri Tekstil, serta Industri Logam, Mesin, dan Alat Perkeayasaan. Investasi terbesar dalam Bidang ILMEA terjadi di Industri Logam, Mesin, dan Alat Perkeayasaan dengan nilai industri sebesar 18.925.166 dan investasi sebesar 17.767.332. Jumlah total nilai industri untuk kedua bidang tersebut adalah 82.483.973, sementara jumlah total investasi adalah 396.596.187.

**Tabel 6. 1 Jenis Sentra Industri, Unit Usaha Produksi dan Tenaga Kerja**

Jenis Industri	Sentra Industri	Unit Usaha	Tenaga Kerja
<b>IKAHH</b>			
<b>Industri Makanan Minuman</b>	86	2.356	5.127
Industri Kayu dan sejenisnya	17	535	1.025
Industri Kertas dan bahan kimia	39	811	3.100
<b>Jumlah</b>	<b>142</b>	3.702	9.252
<b>ILMEA</b>			
Industri aneka	13	348	357
Industri tekstil	18	431	488
Industri logam, mesin, alat angkut	17	472	875
<b>Jumlah</b>	<b>48</b>	1.251	1.720
<b>INDUSTRI MENEGAH</b>	<b>10</b>	20	432
<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	20	432
<b>Jumlah Total</b>	<b>200</b>	4.973	11.404

Sumber Data: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Industri pengolahan adalah proses transformasi bahan mentah menjadi produk akhir dengan nilai tambah yang tinggi, berperan penting dalam rantai pasok global sebagai produsen dan pemasok bahan baku. Namun, kontribusinya dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah cenderung stagnan dari 2019 hingga 2023, berkisar antara 1,83 persen hingga 1,89 persen.

**Tabel 6. 2 Kapasitas Produksi dan Investasi Menurut Jenis Industri di Kabupaten Sumbawa Tahun 2023**

Jenis Industri	Nilai Industri	Investasi
<b>Bidang IKAHH</b>		
<b>Industri Makanan dan Minuman</b>	<b>48.570.746</b>	<b>319.048.636</b>
Industri Kayu, Rotan Rumput dan	3.809.866	12.053.028



Jenis Industri	Nilai Industri	Investasi
sejenisnya		
Industri Pulp, Kertas dan bahan kimia	2.468.892	41.757.329
<b>Jumlah</b>	<b>54.849.504</b>	<b>372.858.993</b>
<b>Bidang ILMEA</b>		
Industri dan Elektronika Aneka	4.950.435	2.704.258
Industri tekstil	3.758.868	3.265.604
Industri Logam, Mesin, Alat Perkeayasaan	18.925.166	17.767.332
<b>Jumlah</b>	<b>27.634.469</b>	<b>23.737.194</b>
<b>Jumlah Total</b>	<b>82.483.973</b>	<b>396.596.187</b>

Sumber Data: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Salah satu dari 10 program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa periode 2021-2026 adalah Penggratisan Label BPOM, Label Halal, Jaminan Pemasaran bagi UMKM, bantuan kemandirian bagi komunitas millenial dan pelaku ekonomi kreatif “start Up dan E- Commerce” yang mana program ini sebagian besar menyasar pelaku IKM dan UMKM Kabupaten Sumbawa demi meningkatkan nilai jual dan daya saing produk-produk lokal Sumbawa di tengah gempuran produk-produk makanan dan non-makanan dari luar daerah Sumbawa sehingga dari sektor UMKM ini mampu menarik lebih banyak tenaga kerja lokal hingga roda perekonomian masyarakat dapat berputar dengan lebih baik.

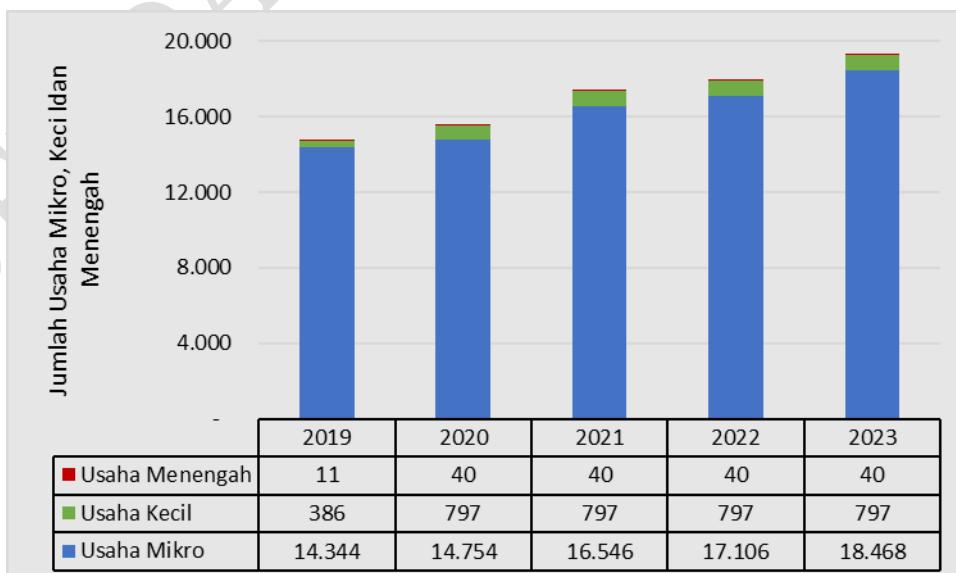
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM dibedakan berdasarkan kriteria asset dan omsetnya sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).



2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dengan kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Di Kabupaten Sumbawa sendiri sektor UMKM terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan ini menunjukkan berkembangnya industri kreatif di Kabupaten Sumbawa yang didorong dengan kemudahan akses terhadap teknologi, digitalisasi, permodalan dan perijinan sehingga masyarakat mampu memperoleh pendapatan yang layak di tengah kondisi ekonomi yang kian tidak menentu.



Gambar 6. 1 Perkembangan Jumlah UMKM di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumbawa

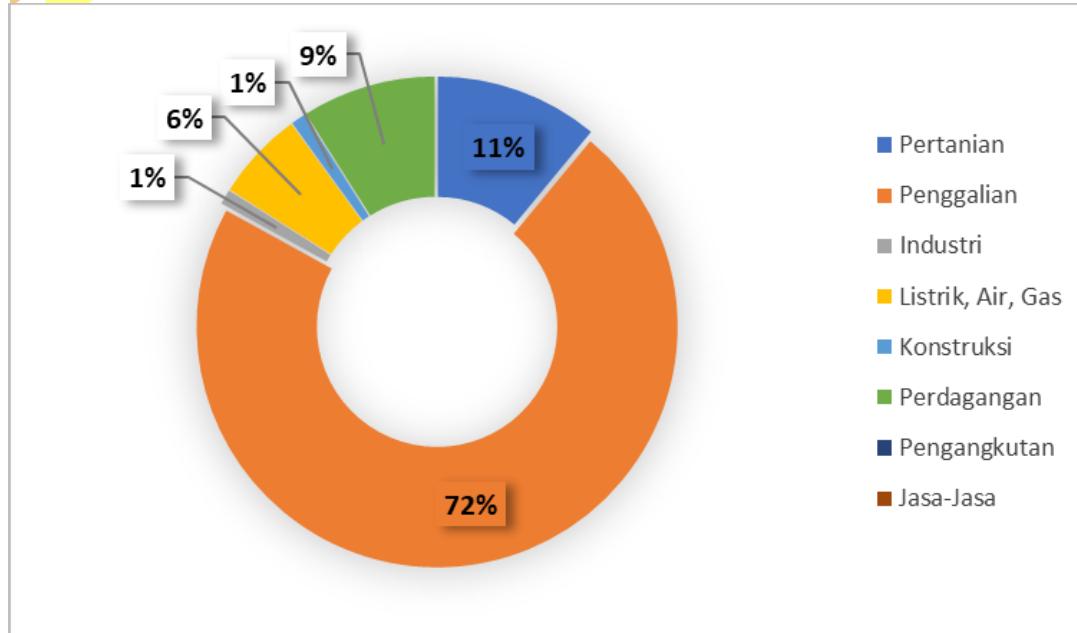
Kawasan Peruntukan Industri Kawasan industri di Kabupaten Sumbawa, meliputi:

1. Pengembangan kawasan sentra industri kecil tersebar di seluruh kawasan perdesaan dan perkotaan Kabupaten Sumbawa
2. Pengembangan agroindustri terutama diarahkan pada Kecamatan Sumbawa Besar, Kecamatan Moyo Utara, Kecamatan Unter Iwes, Kecamatan Labuhan Badas, Kecamatan Alas-Utan, Kecamatan Lopok, Kecamatan Empang, Kecamatan Labangka dan Kecamatan Tarano
3. Pengembangan industri pengolahan hasil kelautan dan perikanan diarahkan pada Kecamatan Empang, Kecamatan Tarano, Kecamatan Moyo Hilir, Kecamatan Moyo Utara, Kecamatan Lunyuk, Kecamatan Labuhan Badas dan Kecamatan Buer
4. Pengembangan industri pengolahan dan pergudangan diarahkan di Kecamatan Labuhan Badas, Kecamatan Unter Iwes, Kecamatan Lape, Kecamatan Lopok, Kecamatan Labangka, dan Kecamatan Alas.

## 6.2. Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah

Posisi simpanan masyarakat Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2023 berada pada nilai nominal 3.799.605 juta rupiah, terjadi peningkatan sebesar 6,22 persen dibandingkan dengan Tahun 2022. Simpanan masyarakat tersebut terdiri dari tabungan sebanyak 2.654.278 juta rupiah, giro sebanyak 279.143 juta rupiah, dan deposito sebanyak 866.184 juta rupiah. Deposito dan tabungan masyarakat Sumbawa mengalami peningkatan.

Posisi pinjaman masyarakat Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2023 di Bank Umum dan BPR meningkat menjadi 12.817.389 juta rupiah. Penggunaan pinjaman untuk modal kerja meningkat sebesar 104,46 persen yang mengindikasikan bahwa masyarakat mencoba mengembangkan usaha dari pinjaman yang dilakukan mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut membuat pinjaman untuk modal kerja lebih tinggi dibanding untuk konsumsi.



Gambar 6. 2 Posisi Pinjaman Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sumbawa Tahun 2023

Sumber: Bank Indonesia Mataram, diolah

Di akhir 2023, posisi pinjaman masyarakat didominasi oleh penggalian sebesar 72% dari total pinjaman pada posisi 12.120.032 juta rupiah, disusul oleh pertanian dengan nilai 1.790.992 juta rupiah, dan perdagangan sebesar 1.454.757 juta rupiah. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa pada akhir tahun kegiatan perekonomian dan perputaran uang di masyarakat didominasi oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian.

Posisi kredit usaha pada tahun 2020 didominasi usaha mikro, sementara sejak tahun 2021 hingga 2022 didominasi oleh usaha kecil. Selama tahun 2020 – 2022, posisi kredit baik usaha mikro, kecil, maupun menengah mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, posisi kredit usaha mikro sebesar 1.356.356 juta rupiah. Untuk kredit usaha kecil dan menengah, pada tahun 2022 masing-masing sebesar 1.415.771 juta rupiah dan 178.849 juta rupiah.

Berdasarkan fungsinya, perbankan sangat diperlukan dalam penggerak perekonomian. Berikut data terkait jumlah kantor bank menurut kelompok bank di Kabupaten Sumbawa Tahun 2022.



**Tabel 6. 3 Jumlah Kantor Bank Menurut Kelompok Bank di Kabupaten Sumbawa Tahun 2022**

Kelompok Bank	KP	KC	KCP	KK
Persero	0	2	27	0
BPD	0	0	0	0
Bank Swasta	0	0	4	0
Bank Asing	0	0	0	0
Bank Umum Syariah	0	0	2	0
BUS-BPD	0	1	5	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>38</b>	<b>0</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa

Jumlah koperasi meningkat baik dari unit maupun dari anggota koperasi dibanding Tahun 2022. Selama 2023, koperasi di Kabupaten Sumbawa bertambah sebanyak 13 dengan jumlah anggota bertambah menjadi 42.364 orang. Volume usaha yang dihasilkan oleh koperasi di Kabupaten Sumbawa selama 2023 sebesar 122.442 juta rupiah. Selama 2023, koperasi di Kabupaten Sumbawa memiliki aset sebanyak 136.678 juta rupiah dengan sisa hasil usaha sebesar 5.884 juta rupiah.

**Tabel 6. 4 Perkembangan Indikator Koperasi di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Jumlah Koperasi (unit)</b>	315	315	264	340	353
<b>Jumlah Anggota (orang)</b>	41.897	41.680	38.469	42.114	42.364
<b>Volume Usaha (Juta Rp)</b>	111.752	114.216	112.598	115.725	122.442
<b>SHU (Juta Rp)</b>	6.776	5.926	5.838	5.888	5.884
<b>Aset (Juta Rp)</b>	144.078	147.521	145.848	157.401	163.678

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan



### 6.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. Menghitung PDRB bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunan, memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah.

Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Gambaran laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumbawa selama kurun waktu lima tahun yaitu dari tahun 2019 hingga tahun 2023 baik ADHB maupun ADHK dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Gambar 6. 3 Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023

Sumber Data: PDRB Kabupaten Sumbawa Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

Keterangan: \* Data Sementara; \*\* Data Sangat Sementara

Nilai PDRB Kabupaten Sumbawa atas dasar dasar harga berlaku pada Tahun 2023 mencapai 17,51 trilyun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 1,40 trilyun rupiah dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar 16,11 trilyun rupiah. Kenaikan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di hampir seluruh lapangan usaha seiring pulihnya kondisi ekonomi pasca pandemi Covid- 19 dan adanya inflasi.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan dari 10,55 trilyun rupiah pada Tahun 2022 menjadi 10,93 trilyun rupiah pada Tahun 2023. Hal ini menunjukkan selama Tahun 2023 Kabupaten Sumbawa mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 3,61 persen. Pertumbuhan ini disebabkan oleh pulihnya kondisi ekonomi pasca pandemi Covid-19, namun tidak dipengaruhi inflasi. Berikut disajikan data PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumbawa.

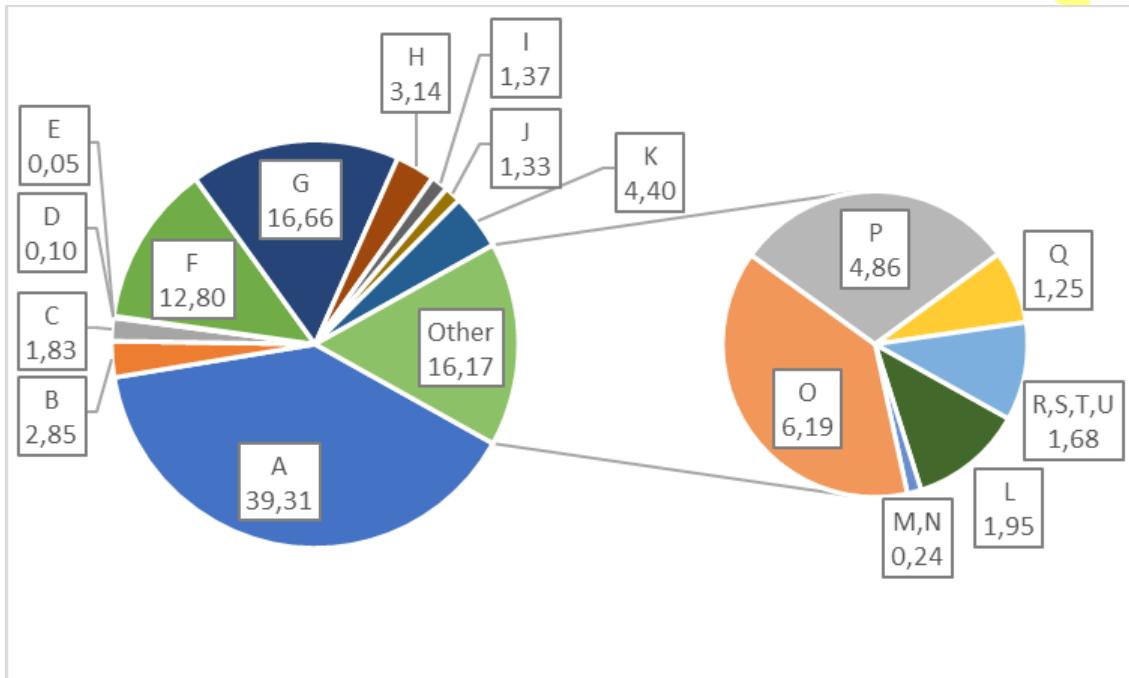


**Tabel 6. 5 PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumbawa Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2019–2023**

Tahun	PDRB ADHB (Miliar Rp.)	PDRB ADHK 2010 (Miliar Rp.)	Laju Pertumbuhan ADHB (%)	Laju Pertumbuhan ADHK 2010 (%)
2019	14.803.285,32	10.470.747,52	8,16	4,86
2020	14.446.250,14	10.032.954,54	-2,41	-4,18
2021	15.021.397,00	10.220.819,19	3,98	1,87
2022*	16.107.717,29	10.548.580,66	7,23	3,21
2023**	17.510.432,81	10.929.058,89	8,71	3,61

Sumber: PDRB Kabupaten Sumbawa Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

Selama rentang Tahun 2019-2023, struktur perekonomian di Kabupaten Sumbawa tidak banyak berubah. Diketahui, penopang ekonomi yang paling utama di Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2023 masih berasal dari kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan sharenya sebesar 39,31 persen. Berikutnya, perekonomian Sumbawa disokong dari kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dengan kontribusinya sebesar 16,66 persen, kemudian oleh kategori konstruksi yang ikut andil sebesar 12,80 persen. Sedangkan kontribusi dari 14 kategori lapangan usaha lainnya tidak lebih dari 7 persen untuk tiap kategorinya. Dominasi kategori pertanian yang ekstrim tersebut menyebabkan ketergantungan ekonomi regional terhadap kategori tersebut sangat besar.



**Gambar 6. 4 Kontribusi Kategori Lapangan Usaha Terhadap PDRB di Kabupaten Sumbawa ADHB Tahun 2023 (%)**

Sumber Data: PDRB Kabupaten Sumbawa Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

Selama periode Tahun 2019-2023, meskipun tidak ada perubahan struktur ekonomi yang signifikan, kontribusi tiga kategori kontributor utama mengalami perubahan. Kontribusi kategori pertanian pada Tahun 2019 sebesar 38,38 persen, pada Tahun 2023 ini mengalami peningkatan ke angka 39,31 persen. Selain kategori pertanian, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor juga mengalami peningkatan sejak 2019, yaitu dari 16,21 meningkat menjadi 16,66 persen di Tahun 2023. Berbeda dengan dua kategori sebelumnya, kategori konstruksi mengalami penurunan peranan selama lima tahun terakhir, yaitu dari 13,88 persen menjadi 12,80 persen.



**Tabel 6. 6 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sumbawa ADHB  
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023**

Kategori	Lapangan Usaha	2019		2020		2021		2022*		2023**	
		ADHB (Milyar)	Persen (%)								
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.681,93	38,38	5.760,90	39,88	5.948,84	39,60	6.256,87	38,84	6.883,49	39,31
B	Pertambangan dan Penggalian	460,77	3,11	430,73	2,98	443,62	2,95	462,48	2,87	498,19	2,85
C	Industri Pengolahan	272,75	1,84	273,01	1,89	279,36	1,86	294,04	1,83	320,79	1,83
D	Pengadaan Listrik dan Gas	12,81	0,09	14,17	0,10	15,26	0,10	16,40	0,10	17,51	0,10
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan	6,77	0,05	6,89	0,05	6,99	0,05	7,55	0,05	8,07	0,05



Kategori	Lapangan Usaha	2019		2020		2021		2022*		2023**	
		ADHB (Miliar)	Persen (%)								
	Daur Ulang										
F	Konstruksi	2.055,43	13,88	1.752,70	12,13	1.906,96	12,69	2.019,77	12,54	2.241,24	12,80
G	Perdagangan Besar dan Eceran	2.399,73	16,21	2.348,29	16,26	2.415,99	16,08	2.677,49	16,62	2.916,68	16,66
H	Transportasi dan Pergudangan	570,67	3,85	414,61	2,87	431,57	2,87	509,47	3,16	550,00	3,14
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	203,14	1,37	166,46	1,15	169,03	1,13	217,71	1,35	239,75	1,37
J	Informasi dan Komunikasi	177,17	1,20	198,13	1,37	207,81	1,38	218,38	1,36	232,54	1,33
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	555,54	3,75	591,59	4,10	628,65	4,19	723,23	4,49	771,02	4,40



Kategori	Lapangan Usaha	2019		2020		2021		2022*		2023**	
		ADHB (Milyar)	Persen (%)								
L	Real Estat	306,12	2,07	309,10	2,14	314,03	2,09	322,81	2,00	340,72	1,95
M,N	Jasa Perusahaan	33,32	0,23	34,47	0,24	34,66	0,23	38,45	0,24	42,24	0,24
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	928,65	6,27	992,55	6,87	1.022,28	6,81	1.063,46	6,60	1.084,60	6,19
P	Jasa Pendidikan	716,67	4,84	735,24	5,09	760,77	5,06	796,32	4,94	850,57	4,86
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	178,52	1,21	182,09	1,26	192,78	1,28	205,41	1,28	219,16	1,25
R,S,T,U	Jasa Lainnya	243,30	1,64	235,31	1,63	242,80	1,62	277,87	1,73	293,86	1,68
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>14.803,29</b>	<b>100,00</b>	<b>14.446,25</b>	<b>100,00</b>	<b>15.021,40</b>	<b>100,00</b>	<b>16.107,72</b>	<b>100,00</b>	<b>17.510,43</b>	<b>100,00</b>



## Profil Daerah Kab. Sumbawa

Kategori	Lapangan Usaha	2019		2020		2021		2022*		2023**	
		ADHB (Milyar)	Persen (%)								

Sumber: PDRB Kabupaten Sumbawa Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023



Laju pertumbuhan ekonomi secara riil digambarkan melalui laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010. Adapun laju pertumbuhan 17 kategori PDRB tersebut terlihat sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 6. 7 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Sumbawa Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2019-2023 (%)**

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022**	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,01	-0,82	1,32	2,50	1,63
B	Pertambangan Penggalian	8,90	-7,61	1,71	0,40	3,59
C	Industri Pengolahan	3,58	-0,85	1,30	2,21	2,60
D	Pengadaan Listrik dan Gas	19,60	12,45	8,91	6,90	5,85
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,62	0,28	0,43	2,58	3,72
F	Konstruksi	11,93	-15,85	5,31	0,47	8,32
G	Perdagangan Besar dan Eceran	6,45	-2,86	1,24	4,49	5,01
H	Transportasi Pergudangan	3,88	-29,56	0,59	13,11	3,32
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,69	-18,63	0,42	22,97	7,39
J	Informasi dan Komunikasi	4,13	10,79	4,26	3,22	3,99
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,40	6,42	0,94	5,14	4,48
L	Real Estat	2,94	0,72	1,18	0,87	4,25
M,N	Jasa Perusahaan	4,71	1,46	0,39	6,16	6,37
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,91	2,83	1,33	1,68	0,10
P	Jasa Pendidikan	6,10	0,49	1,16	2,19	4,69
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,84	-0,10	4,35	5,34	5,47



Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022**	2023
R,S,T,U	Jasa Lainnya	6,16	-5,31	1,13	11,97	2,95
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>4,86</b>	<b>-4,18</b>	<b>1,87</b>	<b>3,21</b>	<b>3,61</b>	

Sumber: PDRB Kabupaten Sumbawa Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada Tahun 2023 dicapai oleh lapangan usaha Konstruksi, yaitu mencapai angka 8,32 persen. Salah satu faktor yang dapat memicu pertumbuhan di lapangan usaha Konstruksi adalah peningkatan investasi dalam proyek infrastruktur, seperti jalan raya, jembatan, dan proyek-proyek lainnya. Pemerintah atau sektor swasta yang meningkatkan investasinya dalam infrastruktur dapat mendorong pertumbuhan konstruksi. Peningkatan di lapangan usaha Konstruksi juga ditunjukkan dari peningkatan produk konstruksi tertentu, seperti semen.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Tahun 2023 adalah lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Lapangan usaha ini pada Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 7,39 persen dari tahun sebelumnya. Adanya kegiatan besar di Kabupaten Sumbawa seperti MXGP Samota 2023 dan konser-konser musik yang dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa mendorong penjualan UMKM yang berdampak pula pada peningkatan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Dengan demikian, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat perlu bagi tercapainya kesejahteraan. Ukuran kesejahteraan memang sulit tercakup dalam satu indikator yang komprehensif, karena masalah aspek multidimensi yang melatar



belakangnya. Meskipun demikian, banyak literatur dan kajian akademik yang menggunakan berbagai alternatif, di antaranya adalah dengan pendekatan variabel PDRB per kapita.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Sumbawa atas dasar harga berlaku sejak Tahun 2019 hingga 2023 cukup berfluktuasi. Pada tahun 2019 PDRB per kapita tercatat sebesar 31,83 juta rupiah. Secara nominal cenderung mengalami kenaikan, namun Tahun 2020 menurun menjadi 28,44 juta rupiah dan kemudian meningkat kembali pada Tahun 2021 sampai dengan 2023 hingga menjadi 33,07 juta rupiah pada Tahun 2023.

**Tabel 6. 8 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Sumbawa, Tahun 2019-2023**

<b>Nilai PDRB (Miliar Rupiah)</b>					
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022*</b>	<b>2023**</b>
<b>ADHB</b>	14.803,29	14.446,25	15.021,40	16.093,64	17.510,43
<b>ADHK 2010</b>	10.470,75	10.032,95	10.220,82	10.548,58	10.929,06
<b>PDRB Perkapita (Ribu Rupiah)</b>					
<b>ADHB</b>	31.826,26	28.442,26	29.155,82	30.836,61	30.070,56
<b>ADHK 2010</b>	22.511,54	19.753,22	19.838,12	20.194,20	20.640,84
<b>Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010 (%)</b>	2,30	-12,25	0,43	1,79	2,21
<b>Jumlah Penduduk (ribu orang)</b>	465	508	515	522	529
<b>Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)</b>	2,50	9,20	1,41	1,39	1,36

Sumber: PDRB Kabupaten Sumbawa Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

PDRB menurut lapangan usaha terdiri dari 17 Kategori, yakni:



## 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mencakup 3 subkategori yaitu subkategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; subkategori Kehutanan dan Penebangan Kayu; subkategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan meliputi Tanaman Pangan, Tanaman Holtikultura, Tanaman Perkebunan, Peternakan, dan Jasa Pertanian dan Perburuan.

Selama Tahun 2019-2023, peranan kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berfluktuasi namun cenderung meningkat. Pada Tahun 2019, kategori ini menyumbang kontribusi sebesar 38,38 persen, kemudian terjadi peningkatan dan penurunan. Pada Tahun 2023 meningkat menjadi 39,31 persen. Kategori ini mempunyai peran yang sangat sentral di Kabupaten Sumbawa. Hal ini terlihat dari distribusi perekonomian di mana kategori ini masih menduduki posisi sebagai kontributor utama terhadap PDRB Kabupaten Sumbawa selama 5 tahun terakhir.



Gambar 6. 5 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023

Sumber Data: PDRB Kabupaten Sumbawa Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

Pada Tahun 2019 laju pertumbuhan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan cenderung tumbuh sebesar 2,01 persen. Kemudian pada Tahun 2020, dampak dari musim kemarau

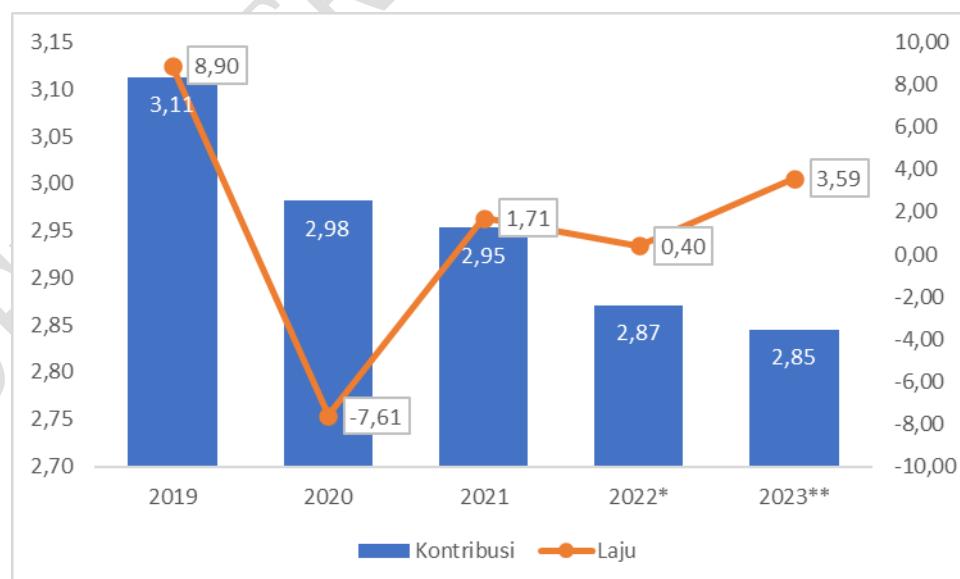


berkepanjangan yang menggeser musim tanam menyebabkan produksi padi pun turun selain karena puso (tidak mengeluarkan hasil – sawah) sehingga menyebabkan kontraksi sebesar 0,82 persen. Laju pertumbuhan kembali tumbuh selama Tahun 2021 – 2023, bahkan tumbuh 2,50 persen karena hasil panen yang semakin banyak hasil pergeseran musim hujan dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2023, pertumbuhan melambat hingga 1,63 persen.

## 2. Pertambangan dan Penggalian

Kategori Pertambangan dan Penggalian dirinci menjadi 4 (empat) subkategori, antara lain: subkategori Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi; subkategori Pertambangan Batubara dan Lignite; subkategori Pertambangan Bijih Logam; dan subkategori Pertambangan dan Penggalian lainnya. Di Sumbawa hanya terdapat Pertambangan Bijih Logam dan Pertambangan dan Penggalian lainnya.

Peran kategori Pertambangan dan Penggalian memang tidak terlalu signifikan, hanya menyumbang sekitar 2 hingga 3 persen pada 5 tahun terakhir dengan kontribusi tertinggi pada Tahun 2019 yaitu sebesar 3,11. Untuk lebih jelas peranan kategori ini dari tahun 2019 hingga 2023 dapat dilihat pada Gambar 6.6.



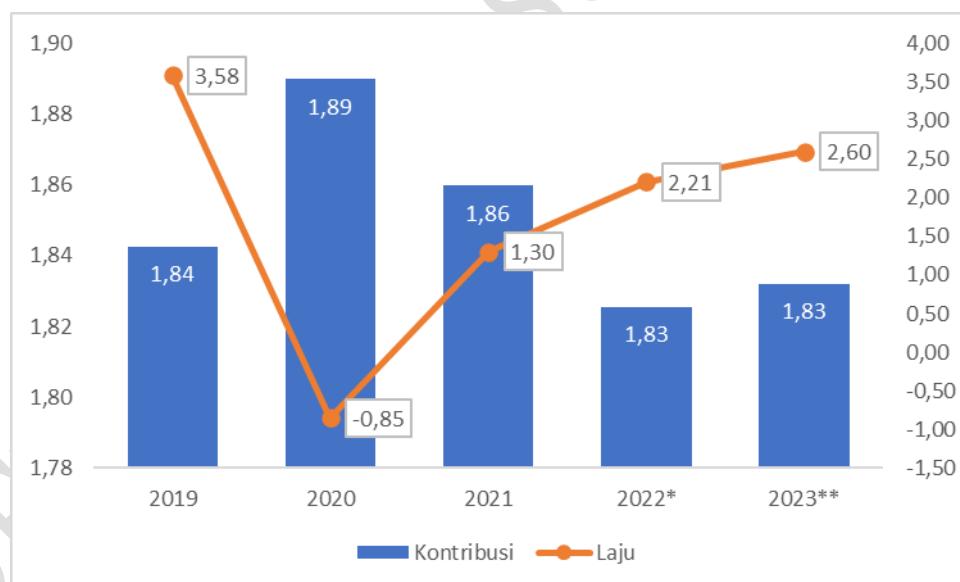
**Gambar 6.6 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023**  
Sumber Data: PDRB Kabupaten Sumbawa Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023



Pertambangan dan Penggalian tumbuh menjanjikan pada 2019, hampir mencapai 9 persen, tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Namun, pada 2020, terjadi bahkan kontraksi hingga -7,61 persen akibat pandemi Covid-19. Meskipun demikian, pada 2021-2023, pertumbuhan sektor ini kembali positif, masing-masing sebesar 1,71 persen, 0,40 persen, dan 3,59 persen. Hal ini dipicu oleh proyek-proyek pembangunan seperti Bendungan Beringin Sila dan sirkuit MXGP Samota.

### 3. Industri Pengolahan

Industri merupakan kegiatan mengubah bentuk baik secara mekanis maupun kimia menjadi produk baru yang lebih tinggi nilainya. Kategori Industri Pengolahan dapat merangsang kegiatan ekonomi lainnya seperti pertanian dan pertambangan jika industri tersebut menggunakan bahan baku berasal dari kegiatan ekonomi tersebut. Kontribusi lapangan usaha ini pada tahun 2019 hingga 2023 cenderung stagnan di kisaran 1,83 persen hingga 1,89 persen.



Gambar 6.7 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023

Sumber Data: PDRB Kabupaten Sumbawa Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

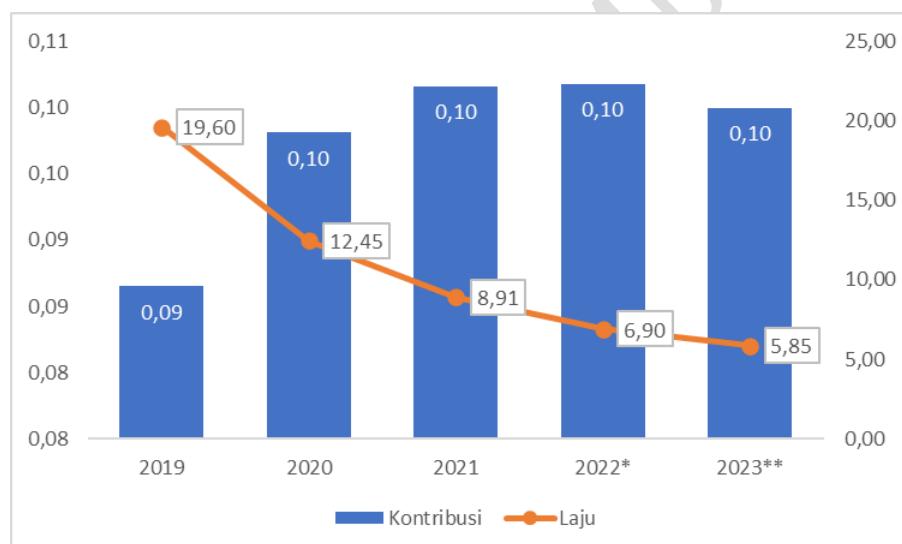
Pertumbuhan ekonomi Industri Pengolahan di Kabupaten Sumbawa fluktuatif dalam 5 tahun terakhir, dengan rata-rata pertumbuhan 1,77 persen. Tertinggi tercatat pada 2019, mencapai 3,58, namun mengalami perlambatan signifikan di 2020 dengan kontraksi -0,85 persen akibat



pandemi Covid-19. Pemulihan terjadi di 2021 dengan pertumbuhan 1,30 persen setelah situasi ekonomi membaik pasca-pandemi, dan terus meningkat ke 2,21 persen di 2022 serta 2,60 persen di 2023.

#### 4. Pengadaan Listrik dan Gas

Listrik sudah menjadi kebutuhan masyarakat modern. Di zaman berkembangnya teknologi yang memudahkan kehidupan seperti sekarang ini, mayoritas teknologi tersebut membutuhkan daya. Sedangkan daya dapat dipenuhi diantaranya dari listrik. Belum semua wilayah di Sumbawa teraliri listrik. Disalurkannya listrik di daerah yang masih belum dialiri listrik akan meningkatkan nilai tambah kategori tersebut terhadap total PDRB Sumbawa. Kategori pengadaan listrik dan gas terdiri dari dua subkategori, yaitu: subkategori Pengadaan Gas dan Produksi Es.



**Gambar 6.8 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023**

Sumber Data: PDRB Kabupaten Sumbawa Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

Kategori Pengadaan Listrik dan Gas mempunyai andil tipis selama 5 tahun terakhir, berkisar antara angka 0,09 sampai 0,10 persen. Untuk Tahun 2023 sendiri, angka kontribusi kategori ini sebesar 0,10 persen atau sebesar 17,51 miliar rupiah jika dilihat atas dasar harga berlaku.

Dalam 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi di sektor Pengadaan Listrik dan Gas Kabupaten Sumbawa melambat. Puncak pertumbuhan terjadi pada 2019 dengan 19,60 persen karena pembangunan pembangkit listrik baru. Namun, kemudian terjadi penurunan, mencapai 12,45 persen

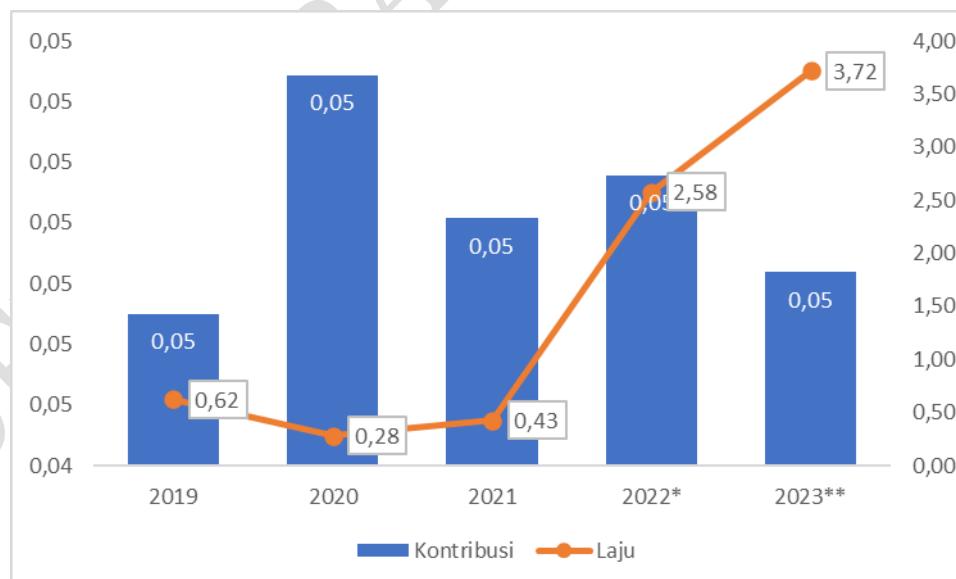


pada 2020, 8,91 persen pada 2021, 6,90 persen pada 2022, dan 5,85 persen pada 2023. Meski mengalami perlambatan, angka tersebut masih tinggi. Penyebabnya termasuk penambahan pasokan listrik 24 jam di Pulau Medang pada 2022, permintaan listrik meningkat untuk acara MXGP Samota, eksplorasi tambang, dan peningkatan penggunaan listrik di sektor industri dan budidaya perikanan, khususnya tambak.

## 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Termasuk juga kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dan sungai, danau, mata air, hujan, dll.

Peranan kategori ini terhadap perekonomian berada di angka 0,05 persen sejak 2019 hingga 2023. Secara nilai tambah terhadap perekonomian memang perannya kecil, tetapi pengadaan air bersih merupakan usaha yang vital demi keberlangsungan hidup bersih dan sehat di Kabupaten Sumbawa. Pengadaan air bersih oleh PERUMDAM Batu Lanteh adalah salah satu pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat Sumbawa.



Gambar 6. 9 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023  
Sumber Data: PDRB Kabupaten Sumbawa Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023



Pertumbuhan ekonomi dalam kategori Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang di Kabupaten Sumbawa dalam 5 tahun terakhir menunjukkan tren meningkat. Pada 2019, laju pertumbuhan mencapai 0,62 persen, meskipun mengalami perlambatan pada 2020 menjadi 0,28 persen, namun kemudian kembali meningkat hingga mencapai 3,72 persen pada 2023. Peningkatan pesat ini dipicu oleh peningkatan jumlah pelanggan dan permintaan yang meningkat, terutama dengan beberapa daerah menghadapi kekeringan akibat fenomena El Nino.

## 6. Konstruksi

Kategori Konstruksi. Kebutuhan akan infrastruktur mutlak diperlukan dalam rangka mendukung proses pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai adalah salah satu faktor daya tarik investasi disamping faktor-faktor lainnya seperti: stabilitas politik dan keamanan yang terjamin, birokrasi perijinan yang ramping dan efisien, jaminan dan perlindungan investasi yang memadai, dan lain-lain. Sebagai daerah yang terus mengupayakan peningkatan pembangunan, kategori infrastruktur menjadi salah satu sasaran pemerintah Sumbawa sebagai media pendobrak perekonomian.



Gambar 6. 10 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Konstruksi di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023

Sumber Data: PDRB Kabupaten Sumbawa Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023



Kategori konstruksi memiliki peran yang signifikan dalam ekonomi Sumbawa selama lima tahun terakhir, berkisar antara 12 hingga 13 persen dari total. Puncak kontribusinya terjadi pada Tahun 2019, mencapai 13,88 persen atau setara dengan 2,05 triliun rupiah. Meskipun mengalami sedikit penurunan pada Tahun 2020 menjadi 12,13 persen, namun kembali meningkat hingga mencapai 12,80 persen pada Tahun 2023. Dengan capaian tersebut, kategori konstruksi tetap kokoh sebagai kontributor terbesar ketiga dalam perekonomian Sumbawa selama lima tahun terakhir.

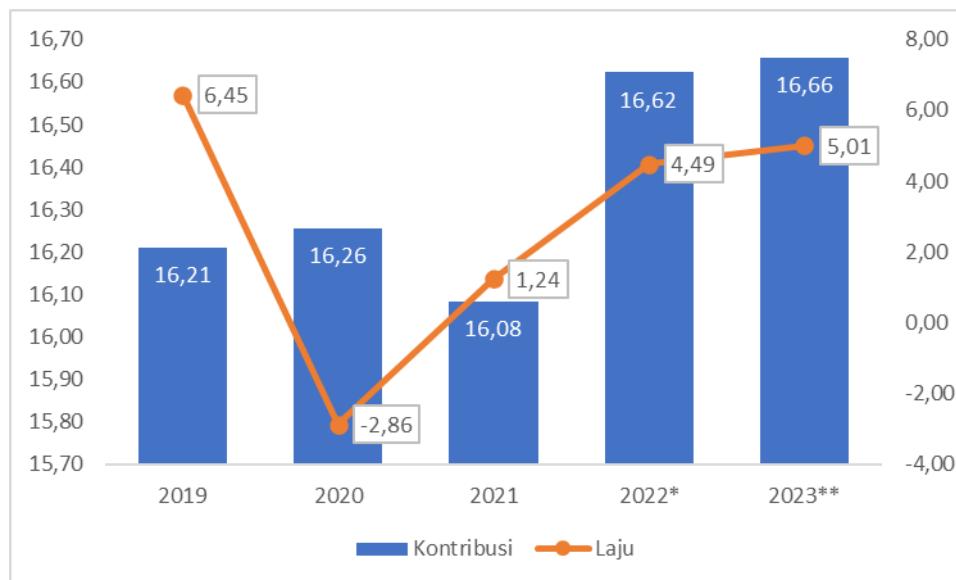
Selama periode 2019 hingga 2023, pertumbuhan ekonomi dalam kategori konstruksi mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, kategori ini mencatat pertumbuhan yang tinggi, mencapai 11,93 persen. Namun, terjadi perlambatan ekstrem hingga kontraksi pada tahun 2020, mencapai -15,85 persen, yang disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19. Selanjutnya, dari tahun 2021 hingga 2023, pertumbuhan ekonomi dalam kategori ini kembali mengalami pertumbuhan positif. Penyebab peningkatan ini termasuk proyek pembangunan Bendungan Beringin Sila di Sumbawa dan infrastruktur lainnya, pembangunan sirkuit MXGP, serta berbagai proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan dan irigasi yang masih aktif di Sumbawa.

## 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil terdiri dari dua subkategori, yaitu Perdagangan Mobil, Sepeda Motor, dan Reparasinya; serta Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor. Pada Tahun 2023, kontribusinya terhadap perekonomian Sumbawa mencapai 16,66 persen, menjadikannya penopang kedua terbesar ekonomi Kabupaten Sumbawa. Pertumbuhan kategori perdagangan selama 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif, terutama di tahun 2020 dimana terkontraksi sebesar 2,86 persen akibat pandemi Covid-19. Namun, kategori ini berhasil tumbuh sebesar 1,24 persen pada 2021, kemudian 4,49 persen pada 2022, dan 5,01 persen pada 2023.



Perkembangan teknologi telah mengubah penyelenggaraan event MXGP dan konser musik dengan promosi yang efisien, penjualan tiket online, dan kemitraan digital, membuka peluang baru bagi sektor perdagangan untuk meningkatkan pendapatan dan menarik lebih banyak kemitraan untuk event-event tersebut.

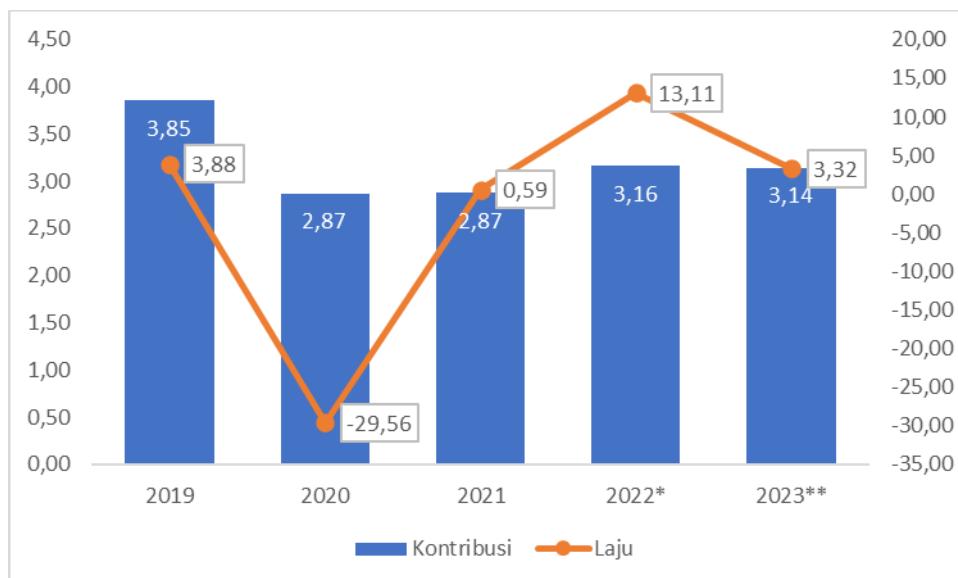


**Gambar 6. 11 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023**  
Sumber Data: PDRB Kabupaten Sumbawa Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

## 8. Transportasi dan Pergudangan

Kategori Transportasi dan Pergudangan merupakan kegiatan penunjang dalam aktivitas perekonomian. Keberadaan kategori ini tentunya semakin mendukung kemajuan lapangan usaha lainnya. Meningkatnya produksi sektor riil dan bertambahnya dinamika mobilitas penduduk merupakan potensi untuk mendongkrak kinerja sektor ini.

Kontribusi kategori Transportasi dan Pergudangan terhadap total PDRB Kabupaten Sumbawa dalam 5 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan dari 3,85 persen pada 2019 menjadi 3,14 persen pada Tahun 2023.



Gambar 6. 12 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023

Sumber Data: PDRB Kabupaten Sumbawa Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

Selama 5 tahun terakhir, laju pertumbuhan dalam kategori Transportasi dan Pergudangan di Kabupaten Sumbawa telah mengalami fluktuasi yang signifikan. Terutama pada tahun 2020, dampak dari pandemi Covid-19 menyebabkan perlambatan pertumbuhan yang ekstrim dan bahkan terkontraksi sebesar -29,56 persen.

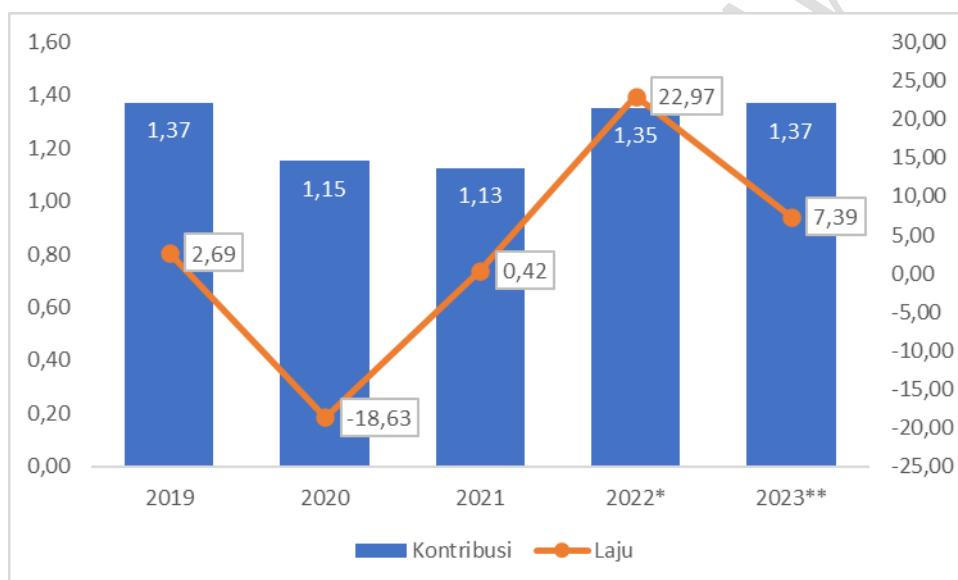
Namun, laju pertumbuhan ekonomi dalam kategori ini telah pulih kembali, dengan peningkatan yang pesat mencapai 13,11 persen pada Tahun 2022, meskipun melambat menjadi 3,32 persen pada tahun 2023. Peningkatan ini sebagian disebabkan oleh meningkatnya jumlah penumpang kendaraan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkot, seiring dengan pemulihan mobilitas pasca-pandemi Covid-19. Selain itu, event MXGP juga telah meningkatkan permintaan akan transportasi antar daerah baik di Kabupaten Sumbawa maupun masuk dan keluar dari kabupaten tersebut.



## 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Kategori Penyedia Akomodasi dan Makan Minum terbagi menjadi dua subkategori, yaitu: subkategori Penyediaan Akomodasi dan subkategori Penyediaan Makan Minum. Kategori lapangan usaha penyedia akomodasi dan makan minum mencakup bisnis seperti hotel, restoran, kafe, dan layanan sejenisnya yang menyediakan tempat menginap serta makanan dan minuman kepada pelanggan.

Kontribusi kategori ini tidak terlalu signifikan, hanya 1,37 persen dari total perekonomian di Sumbawa pada Tahun 2023 atau menyumbang sekitar 239,75 Miliar rupiah.



**Gambar 6. 13 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023**

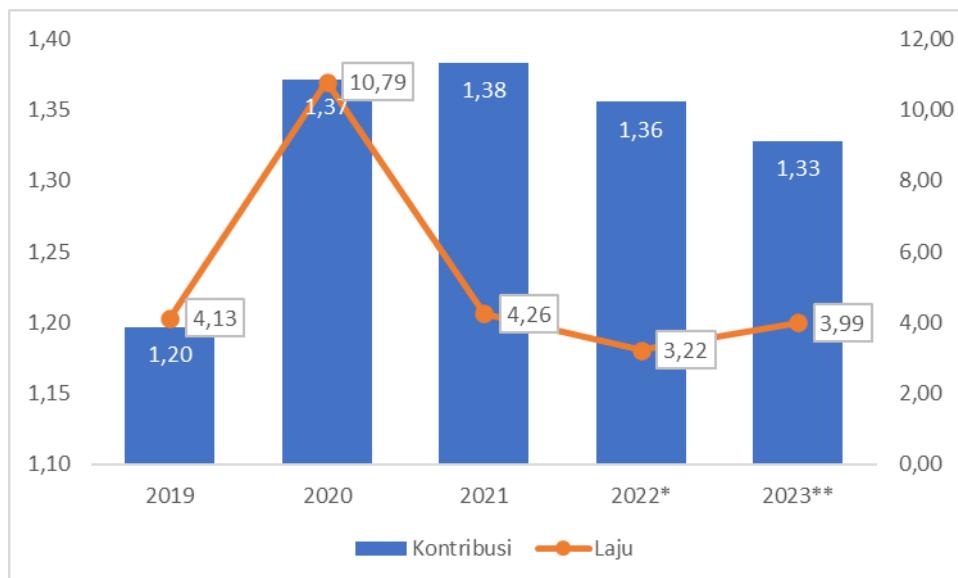
Sumber Data: PDRB Kabupaten Sumbawa Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami fluktuasi selama 2019-2023, terutama karena pandemi Covid-19. Pada 2020, sektor ini terkontraksi -18,63 persen karena pembatasan perjalanan dan penutupan bisnis. Pada 2021, pertumbuhan kembali positif 0,42 persen, meskipun belum mencapai level sebelum Covid- 19. Pelonggaran pembatasan perjalanan dan kegiatan menyebabkan pertumbuhan yang signifikan: 22,97 persen di 2022 dan 7,39 persen di 2023. Ini didorong oleh layanan pesan antar, Car Free Day mingguan, dan event MXGP Samota sejak 2022 yang menjadi stimulus perekonomian di sektor ini.



## 10. Informasi dan Komunikasi

Kategori Informasi dan Komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan kategori ini sangat penting dan menjadi indikator kemajuan suatu bangsa, terutama jasa komunikasi.



Gambar 6. 14 Konstribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023

Sumber Data: PDRB Kabupaten Sumbawa Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

Peranan kategori informasi dan komunikasi di Kabupaten Sumbawa selama lima tahun terakhir relatif stabil di kisaran 1 persen. Tahun 2021 merupakan tahun dengan kontribusi tertinggi selama lima tahun terakhir yaitu sebesar 1,38 persen.

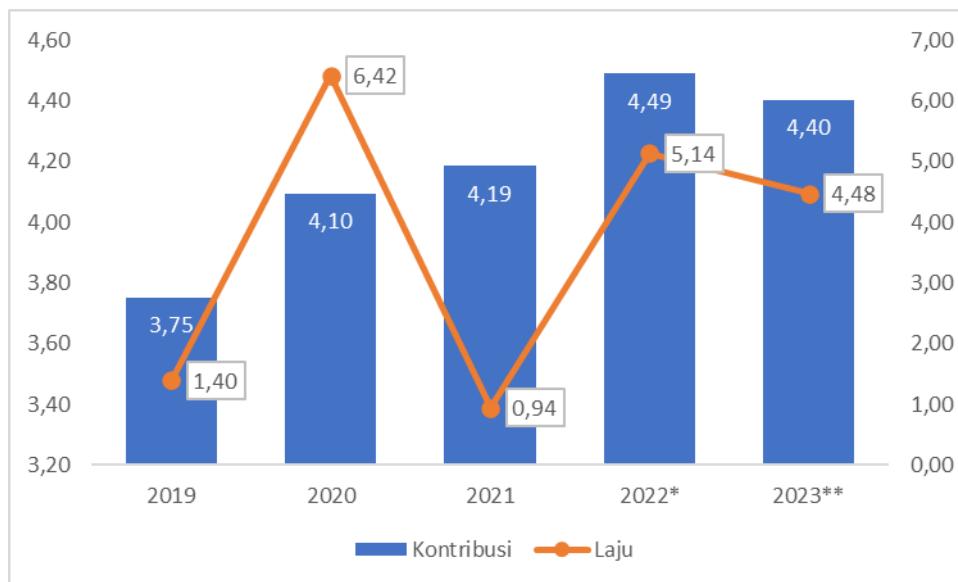
Pertumbuhan kategori ini tidak lepas dari upaya peningkatan fasilitas dan kecepatan layanan yang terus dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi, seperti pengembangan jaringan fiber optic. Selain itu, karena pembatasan mobilitas di masa pandemi, menyebabkan meningkatnya penggunaan internet secara signifikan termasuk untuk meeting online, bermedia sosial, dan transaksi online. Ini menyebabkan pertumbuhan ini selalu positif selama 2019 – 2023.

## 11. Jasa Keuangan dan Asuransi

Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi berperan penting dalam menyediakan layanan keuangan dan asuransi baik kepada perorangan,



korporasi, maupun pemerintah. Layanan jasa keuangan memberikan akses modal ke pelaku ekonomi, memberikan ruang investasi dan inovasi, serta mitigasi risiko. Banyak industri yang bergantung pada kategori ini. Kontribusinya dalam PDRB Kabupaten Sumbawa relatif stabil selama 5 tahun terakhir, dengan rata-rata sekitar 4,09 persen. Pada 2023, kontribusi kategori ini menjadi 4,40 persen atau setara dengan 771,02 miliar rupiah.



**Gambar 6. 15 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023**

Sumber Data: PDRB Kabupaten Sumbawa Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

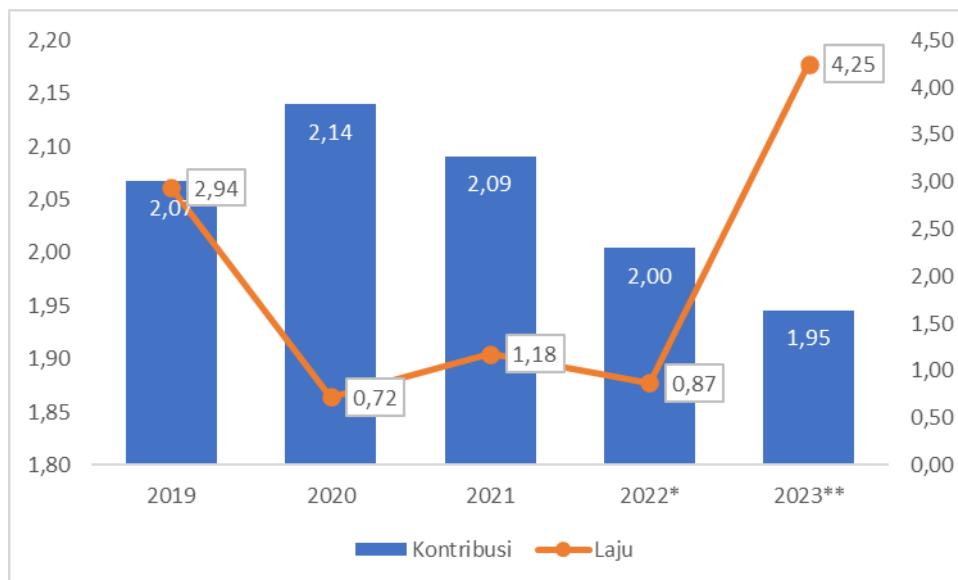
Dalam kategori ini, terdapat empat subkategori, antara lain; subkategori Jasa Perantara Keuangan; subkategori Asuransi dan Dana Pensiun; subkategori Jasa Keuangan Lainnya; dan subkategori Jasa Penunjang Keuangan. Kontribusi sektor ini cenderung mengalami peningkatan dari selama 2019 hingga 2023 dari 3,75 persen menjadi 4,40 persen.

Untuk nilai laju pertumbuhan ekonomi sendiri, nilai indikator Jasa Keuangan dan Asuransi cenderung fluktuatif selama kurun waktu Tahun 2019-2023. Pada Tahun 2023 laju pertumbuhan melambat menjadi 4,48 persen, dari 5,14 persen pada tahun 2022.



## 12. Real Estat

Kategori Real Estat memberikan kontribusi yang relatif stabil bagi PDRB Kabupaten Sumbawa dengan peranan sekitar 2 persen periode Tahun 2019 - 2023. Sumbangan kategori ini cenderung menurun hingga pada Tahun 2023 kontribusinya sebesar 1,95 persen.



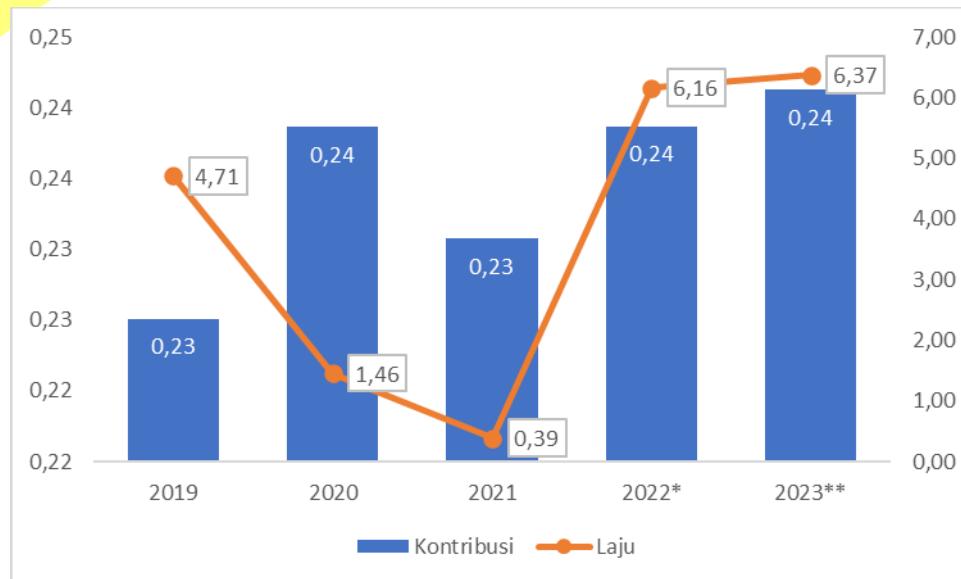
Gambar 6. 16 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Real Estate di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023

Sumber Data: PDRB Kabupaten Sumbawa Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

Pada 2019, pertumbuhan 2,94 persen mencerminkan ketahanan sektor real estat. Meskipun diwarnai pandemi Covid-19, pada 2020 real estate masih tumbuh 0,72 persen, menunjukkan ketahanannya dalam menghadapi ketidakpastian. Tahun 2021 ditandai dengan pertumbuhan meningkat menjadi 1,18 persen, sementara 2022 stabil dengan kenaikan 0,87 persen. Namun, di 2023, real estate melesat dengan pertumbuhan signifikan mencapai 4,25 persen, menandai pemulihan pasar properti setelah masa-masa pandemi.

## 13. Jasa Perusahaan

Kontribusi kategori Jasa Perusahaan relatif stabil selama 5 tahun terakhir, yaitu kurang dari 1 persen untuk Tahun 2019-2023. Untuk Tahun 2023, kategori Jasa Perusahaan sebesar 0,24 persen atau sebesar 42,24 Miliar rupiah. Peranan kategori ini relatif kecil dibandingkan dengan peranan kategori lain.



**Gambar 6. 17 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Jasa Perusahaan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023**

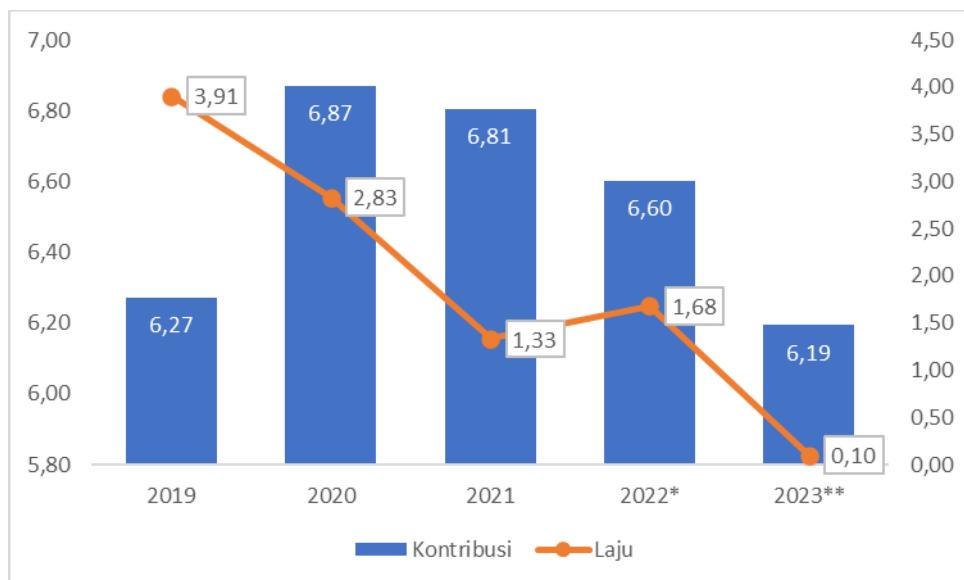
Sumber Data: PDRB Kabupaten Sumbawa Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

Pada 2019, kenaikan 4,71 persen menandai performa yang kuat, sementara 2020 mencatat kenaikan 1,46 persen. Tahun 2021 melambat menjadi 0,39 persen, namun pada 2022, pertumbuhan signifikan mencapai 6,16 persen, diikuti dengan pertumbuhan 6,37 persen di tahun 2023, menandai pemulihan ekonomi yang stabil dan meningkatnya aktivitas bisnis.

#### **14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib**

Kategori ini mencakup kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan, dan layanan jaminan sosial yang dikelola oleh pemerintah. Kegiatan yang diklasifikasikan di kategori lain dalam KBLI tidak termasuk pada kategori ini, meskipun dilakukan oleh badan pemerintahan.

Sebagai contoh administrasi sistem sekolah, (peraturan, pemeriksaan, dan kurikulum) termasuk pada kategori ini, tetapi pengajaran itu sendiri masuk ke kategori Jasa Pendidikan (P) dan rumah sakit penjara atau militer diklasifikasikan pada kategori Q.

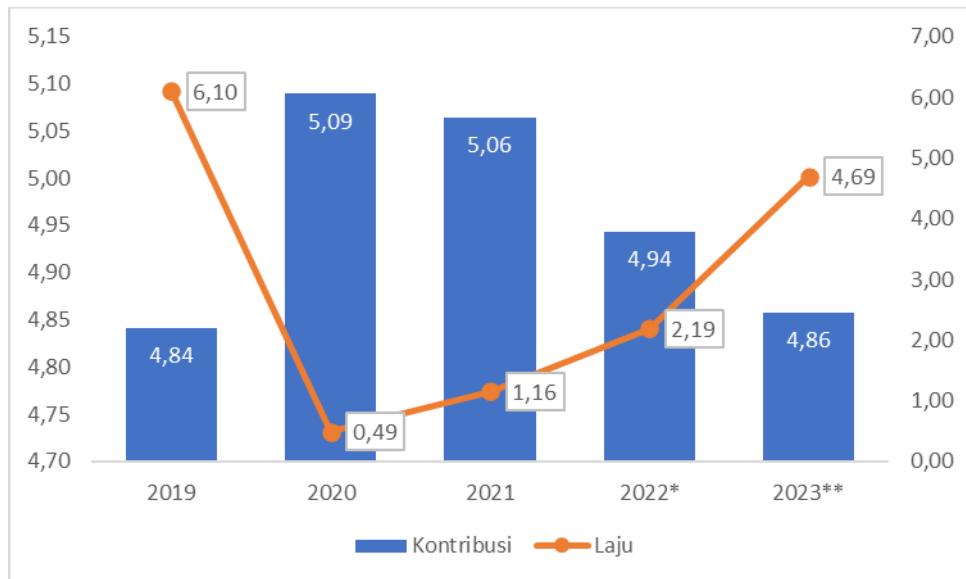


Gambar 6. 18 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023  
Sumber Data: PDRB Kabupaten Sumbawa Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

Sektor ini memiliki peran vital dalam ekonomi, menunjukkan kontribusi yang stabil selama 5 tahun terakhir, mulai dari 6,27% di 2019, naik menjadi 6,87% di 2020, dan turun perlahan hingga mencapai 6,19% di 2023. Peningkatan ini sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan layanan publik dan menghadapi pandemi Covid-19. Meskipun mengalami perlambatan, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib tetap menunjukkan pertumbuhan yang positif, meningkat sebesar 0,10% pada tahun 2023.

## 15. Jasa Pendidikan

Selama Tahun 2019-2023, Jasa pendidikan menyumbang peranan yang cukup besar terhadap total perekonomian Sumbawa, yaitu berkisar antara nilai 4,84 hingga 5,09 persen. Nilai ini berhasil bertahan sebagai penyumbang perekonomian terbesar kelima selama 5 tahun terakhir. Kontribusi kategori ini meningkat cukup tinggi pada Tahun 2020 menjadi 5,09 persen, namun kembali turun hingga pada Tahun 2023 menjadi 4,86 persen. Kontribusi pada kategori pendidikan mengindikasikan tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam dunia pendidikan.



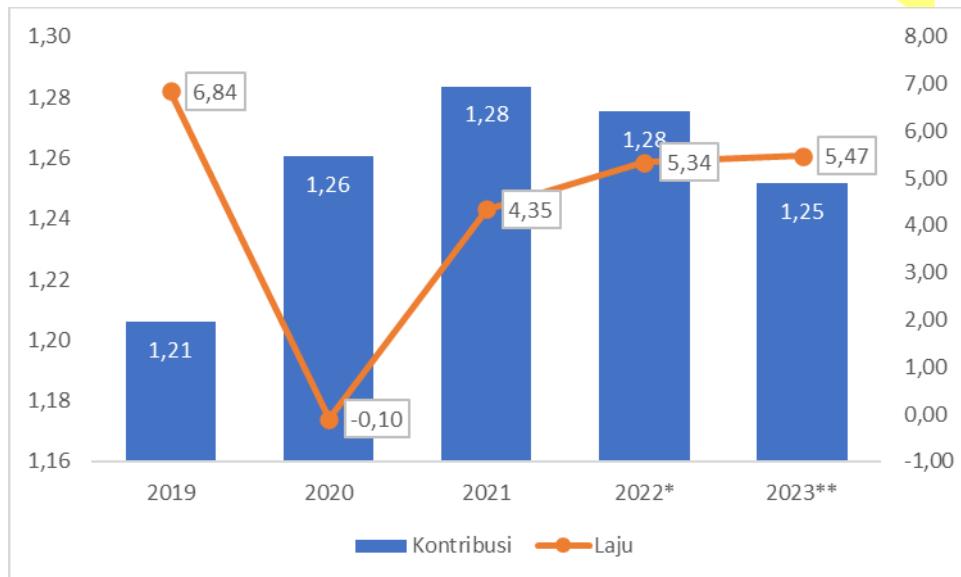
**Gambar 6. 19 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Jasa Pendidikan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023**

Sumber Data: PDRB Kabupaten Sumbawa Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

Laju pertumbuhan dimulai dengan pertumbuhan kuat 6,10 persen pada 2019, kemudian terjadi penurunan drastis menjadi 0,49 persen pada 2020 akibat pandemi Covid-19. Meskipun ada sedikit pemulihan pada 2021 dengan pertumbuhan 1,16 persen, perbaikan yang lebih signifikan terlihat pada 2022 dengan pertumbuhan 2,19 persen. Pada 2023, terjadi lonjakan pertumbuhan mencapai 4,69 persen, menandakan pemulihan yang lebih kuat. Tantangan aksesibilitas dan kualitas pendidikan masih relevan, sementara secara nasional, pertumbuhan ini menunjukkan komitmen untuk memperbaiki sistem pendidikan dalam menghadapi situasi darurat seperti pandemi.

## 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kesehatan menjadi fokus utama seiring dengan peningkatan kesejahteraan dan kesadaran masyarakat. Perhatian terhadap dinamika jasa kesehatan juga mencerminkan seriusnya pemerintah dalam mencapai target SDGs, khususnya dalam peningkatan angka harapan hidup. Selama lima tahun terakhir, kontribusi Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial di Kabupaten Sumbawa stabil di sekitar 1%, mencapai 1,25% pada tahun 2023.



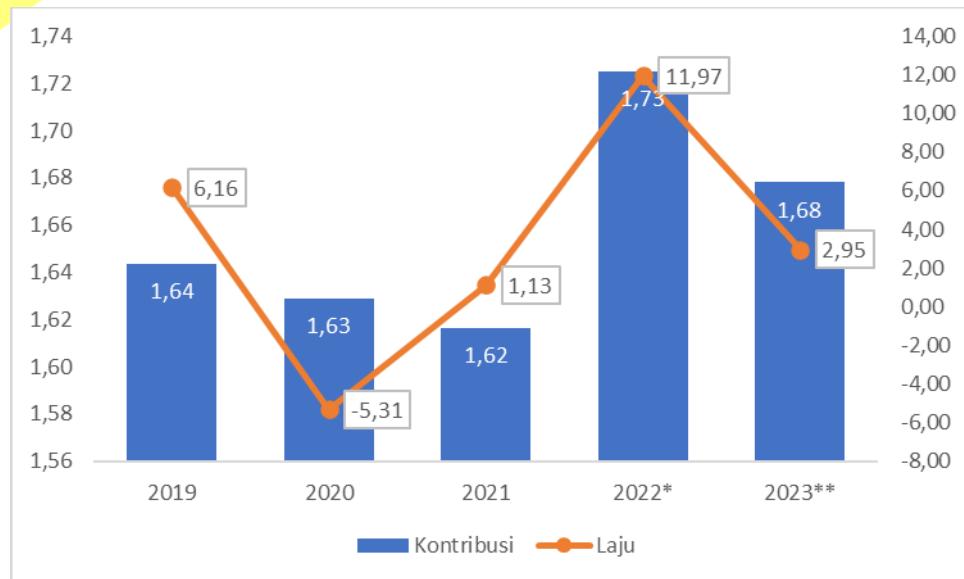
Gambar 6. 20 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023

Sumber Data: PDRB Kabupaten Sumbawa Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

Pertumbuhan jasa kesehatan dan kegiatan sosial di Kabupaten Sumbawa selama lima tahun terakhir cukup berfluktuasi. Dimulai dengan lonjakan 6,84 persen pada 2019, disusul penurunan -0,10 persen di 2020 akibat pandemi Covid-19. Pada 2021, sektor ini pulih dengan pertumbuhan 4,35 persen, dan terus meningkat hingga mencapai 5,34 persen di 2022 dan 5,47 persen di 2023. Hal ini mencerminkan komitmen yang berkelanjutan dalam meningkatkan layanan kesehatan dan kegiatan sosial di Kabupaten Sumbawa serta ketangguhan dalam menghadapi tantangan.

## 17. Jasa lainnya

Kontribusi Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 relatif kecil hanya 1,68 persen atau sebesar 293,86 miliar rupiah. Kontribusinya relatif stabil di kisaran 1,6 persen selama Tahun 2019- 2023.



**Gambar 6. 21 Gambar 6.21 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Jasa Lainnya di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023**

Sumber Data: PDRB Kabupaten Sumbawa Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

Kontribusi sektor jasa lainnya dalam lima tahun terakhir kurang signifikan, hanya sekitar 1 persen dari total PDRB. Pertumbuhan positif terjadi pada 2019 dengan 6,61 persen, tetapi mengalami kontraksi drastis pada 2020 menjadi -5,31 persen karena dampak pandemi Covid-19. Namun, seiring perbaikan situasi dan peningkatan pengunjung di sektor-sektor seperti jasa kecantikan, hiburan, dan pariwisata, pertumbuhan kembali meningkat, mencapai puncaknya pada 2022 dengan 11,97 persen karena adanya MXGP Samota, kemudian melambat menjadi 2,95 persen pada 2023.

#### 6.4. Indeks Harga Implisit

Indikasi stabilnya perekonomian suatu daerah adalah stabilitas inflasi/deflasi, dimana inflasi atau deflasi adalah perubahan harga barang ditingkat konsumen, atau merupakan perubahan dari indeks harga konsumen (IHK). Dalam PDRB, kenaikan harga barang-barang dicerminkan oleh perkembangan laju Indeks Harga Implisit (IHI). Perkembangan harga barang akan memengaruhi kemampuan masyarakat membeli barang-barang kebutuhan hidup, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila tanpa



diikuti oleh stabilnya harga-harga barang, dikatakan belum mampu menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Indeks harga implisit menggambarkan tingkat perubahan harga umum seluruh komoditi baik barang maupun jasa yang terjadi disuatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun. Perubahan Indeks Harga Implisit (IHI) mencerminkan tingkat inflasi yang terjadi dalam suatu periode. Perubahan Indeks Harga Implisit dapat dianggap lebih menggambarkan tingkat inflasi yang menyeluruh dibandingkan dengan indikator inflasi lainnya seperti Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Indeks Sembilan Bahan Pokok. Hal ini disebabkan Indeks Harga Implisit sudah mewakili semua jenis harga yaitu harga konsumen, harga produsen, harga perdagangan besar, harga eceran dan harga lainnya yang sesuai dengan berbagai jenis harga yang dipergunakan dalam penghitungan nilai produksi setiap sektor.

Dengan berkembangnya perekonomian berarti semua komponen nilai tambah, termasuk upah dan gaji serta keuntungan pengusaha (bagian dari surplus usaha) juga meningkat. Kenaikan upah dan gaji sebagai balas jasa faktor produksi tenaga kerja akan dapat menaikkan daya beli masyarakat, dengan catatan harga barang kebutuhan relatif stabil. Bila daya beli masyarakat meningkat berarti terdapat perbaikan tingkat kesejahteraan dan secara simultan akan mendorong sektor produksi dan distribusi barang dan jasa. Selanjutnya, kondisi tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

**Tabel 6. 9 Indeks Harga Implisit Kab. Sumbawa**

No	KATEGORI	2019	2020	2021	2022*	2023**
1	Pertanian	140,19	143,32	146,06	149,89	162,25
2	Pertambangan dan Penggalian	133,25	134,82	136,53	141,76	147,41
3	Industri Pengolahan	119,79	120,93	122,15	125,79	133,76
4	Pengadaan Listrik dan Gas	105,32	103,67	102,48	103,00	103,90



No	KATEGORI	2019	2020	2021	2022*	2023**
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	140,21	142,32	143,72	151,38	155,96
6	Konstruksi	135,10	136,89	141,43	149,09	152,73
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	146,19	147,27	149,67	158,74	164,68
8	Transportasi dan Pergudangan	141,13	145,56	150,62	157,20	164,25
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	171,53	172,75	174,67	182,95	187,60
10	Informasi dan Komunikasi	108,01	109,02	109,68	111,66	114,34
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	146,01	146,10	153,81	168,30	171,73
12	Real Estate	148,00	148,37	148,98	151,82	153,72
13	Jasa Perusahaan	138,04	140,76	140,98	147,30	152,15
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Jaminan Wajib dan Sosial	170,44	177,15	180,06	184,22	187,69
15	Jasa Pendidikan	143,65	146,65	150,01	153,65	156,76
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	129,78	132,51	134,45	136,00	137,57
17	Jasa-Jasa	131,67	134,49	137,22	140,25	144,07
	<b>PDRB</b>	<b>141,38</b>	<b>143,99</b>	<b>146,97</b>	<b>152,70</b>	<b>160,22</b>



Laju IHPI dapat digambarkan sebagai nilai inflasi daerah. Untuk inflasi PDRB di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,02 poin dibandingkan tahun 2022, dimana pada tahun 2023 tercatat sebesar 4,92 (yoY) dan pada tahun 2022 sebesar 3,90 (yoY). Penyumbang laju inflasi PDRB pada tahun 2022 bila dilihat dari masing-masing kategori, maka kategori pertanian mempunyai andil yang cukup besar dalam pembentukan laju inflasi PDRB sebesar 8,25.

**Tabel 6. 10 Laju Perubahan Indeks Harga Implisit Kabupaten Sumbawa Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (Persen)**

No	KATEGORI	2019	2020	2021	2022*	2023**
1	Pertanian	3,09	2,23	1,92	2,62	8,25
2	Pertambangan dan Penggalian	4,43	1,18	1,26	3,84	3,99
3	Industri Pengolahan	2,48	0,95	1,01	2,98	6,34
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,24	-1,57	-1,14	0,51	0,87
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,14	1,50	0,98	5,33	3,03
6	Konstruksi	5,39	1,33	3,31	5,42	2,44
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	3,85	0,74	1,63	6,06	3,74
8	Transportasi dan Pergudangan	2,35	3,13	3,48	4,37	4,49
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,95	0,71	1,11	4,74	2,54
10	Informasi dan Komunikasi	1,55	0,94	0,60	1,81	2,39
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,90	0,06	5,27	9,42	2,04
12	Real Estate	1,44	0,25	0,41	1,91	1,25
13	Jasa Perusahaan	3,07	1,97	0,16	4,48	3,29
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	0,88	3,94	1,64	2,31	1,88



No	KATEGORI	2019	2020	2021	2022*	2023**
	Wajib					
15	Jasa Pendidikan	2,22	2,09	2,29	2,43	2,02
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,36	2,11	1,46	1,15	1,16
17	Jasa-Jasa	2,98	2,14	2,03	2,21	2,72
	<b>PDRB</b>	<b>3,15</b>	<b>1,85</b>	<b>2,07</b>	<b>3,90</b>	<b>4,92</b>

## 6.5. Location Quotient dan Dynamic Location Quotient (DLQ)

### 1. Location Quotient (LQ)

Location Quotient (LQ) adalah suatu metode untuk menghitung perbandingan relatif sumbangan nilai tambah sebuah sektor di suatu daerah (Kabupaten/Kota) terhadap sumbangan nilai tambah sektor yang bersangkutan dalam skala provinsi atau nasional. Dengan kata lain, LQ dapat menghitung perbandingan antara *share output* sektor i di kota dan *share output* sektor i di provinsi:

$$LQ = \frac{\frac{VA_i^k}{\sum VA_k}}{\frac{VA_i^p}{\sum VA_p}}$$

Dimana:

$LQ$  = Koefisien Location Quotient

$VA_i^k$  = Value added (nilai tambah) sektor i di tingkat kabupaten/kota

$\sum VA_k$  = Total value added (PDRB) di tingkat kabupaten/kota

$VA_i^p$  = Value added (nilai tambah) sektor i di tingkat provinsi

$\sum VA_p$  = Total value added (PDRB) di tingkat provinsi.



Nilai koefisien Location Quotient adalah antara 0 (nol) dan tak terhingga. Kriteria penggolongannya adalah sebagai berikut:

- Jika  $LQ > 1$ , hal itu menunjukkan bahwa sektor tersebut merupakan sektor basis yang mampu mengekspor hasil industrinya ke daerah lain.
- Jika  $LQ < 1$ , hal itu menunjukkan bahwa sektor tersebut bukan merupakan sektor basis dan cenderung mengimpor untuk daerah lain.
- Jika  $LQ = 1$ , hal itu menunjukkan bahwa produk domestik yang dimiliki daerah tersebut habis dikonsumsi oleh daerah tersebut.

$LQi > 1$  mengindikasikan ada kegiatan ekspor di sektor tersebut atau sektor basis (B), sedangkan  $LQi < 1$  disebut sektor nonbasis (NB).

Ada beberapa keunggulan dari metode LQ, antara lain:

1. Metode LQ memperhitungkan ekspor langsung dan ekspor tidak langsung
2. Metode LQ sederhana dan tidak mahal serta dapat diterapkan pada data historis untuk mengetahui tren.

Sedangkan kelemahan Metode LQ adalah:

1. Berasumsi bahwa pola permintaan di setiap daerah identik dengan pola permintaan bangsa dan bahwa produktivitas tiap pekerja di setiap sektor regional sama dengan produktivitas tiap pekerja dalam industri-industri nasional.
2. Berasumsi bahwa tingkat ekspor tergantung pada tingkat disagregasi.

Berdasarkan hasil analisis Location Quotient (LQ), diperoleh besaran LQ Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut:

**Tabel 6. 11 Location Quotient Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023**

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,69	1,74	1,75	1,82	1,78



No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
2	Pertambangan dan Penggalian	0,24	0,18	0,18	0,16	0,18
3	Industri Pengolahan	0,46	0,48	0,48	0,50	0,49
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,24	1,33	1,35	1,36	1,35
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,59	0,59	0,59	0,61	0,61
6	Konstruksi	1,31	1,33	1,29	1,37	1,32
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,08	1,15	1,15	1,18	1,14
8	Transportasi dan Pergudangan	0,55	0,59	0,58	0,58	0,54
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,67	0,79	0,79	0,81	0,78
10	Informasi dan Komunikasi	0,62	0,64	0,63	0,66	0,64
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,03	1,02	0,99	1,08	1,12
12	Real Estat	0,63	0,65	0,65	0,66	0,64
13	Jasa Perusahaan	1,25	1,36	1,36	1,38	1,35
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,01	1,04	1,04	1,07	1,05
15	Jasa Pendidikan	0,98	1,01	1,01	1,04	1,02
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,59	0,63	0,61	0,65	0,63
17	Jasa Lainnya	0,75	0,78	0,78	0,82	0,78

Dari hasil analisis pada Tabel di atas, tampak bahwa secara umum kategori LQ sektor/lapangan usaha di Kabupaten Sumbawa belum mengalami pergeseran dari tahun 2019-2023. Sektor/lapangan usaha yang digolongkan kuat ( $LQ>1$ ) sebagai kategori basis di Kabupaten Sumbawa adalah **kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; kategori Pengadaan Listrik dan Gas; kategori Konstruksi; kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; kategori Jasa Keuangan dan Asuransi; kategori Jasa Perusahaan;**



## **kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; kategori Jasa Pendidikan.**

Terdapat satu sektor/lapangan usaha yang mengalami pergeseran nilai LQ dari  $LQ < 1$  menjadi  $LQ > 1$  yaitu sektor/lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi. Sektor/lapangan usaha ini dalam kurun waktu 2 tahun terakhir yakni tahun 2019-2020 masih menjadi sektor basis, namun di tahun 2021 nilai LQ nya adalah 0,99, akan tetapi pada tahun 2022 dan 2023 nilainya masing-masing tercatat sebesar 1,08 dan 1,12 sehingga kembali menjadi sektor basis.

### **2. Dynamic Location Quotient (DLQ)**

Metode Dynamic Location Quotient (DLQ) merupakan pengembangan dari LQ dengan mengakomodasi faktor laju pertumbuhan keluaran sektor ekonomi dari waktu ke waktu (Nugroho, 2010). DLQ mengakomodasi laju pertumbuhan ekonomi suatu sektor amatan maupun perekonomian secara keseluruhan selama periode tertentu. Hasil analisis DLQ menunjukkan potensi suatu sektor untuk menjadi basis ekonomi di masa mendatang. Dengan mengombinasikan antara LQ dan DLQ, pengambil kebijakan dapat menilai peran suatu sektor ekonomi dalam perekonomian termasuk prospek sektor tersebut ke depan. Metode DLQ menggunakan rumus:

$$DLQ = \left[ \frac{1 + g_{ik}/1 + g_k}{1 + g_{ip}/1 + g_p} \right]^t$$

Dimana:

$DLQ$  = Indeks potensi sektor / di regional

$g_{ik}$  = Laju pertumbuhan sektor / di regional

$g_k$  = Rata-rata laju pertumbuhan sektor di regional

$g_{ip}$  = Laju pertumbuhan sektor / di provinsi



$g_p$  = Rata-rata laju pertumbuhan sektor di provinsi

$t$  = Selisih tahun akhir dan tahun awal

- Jika  $DLQ > 1$ , maka **potensi perkembangan** sektor i di suatu regional **lebih cepat** dibandingkan sektor yang sama di provinsi
  - Jika  $DLQ < 1$ , maka **potensi perkembangan** sektor i di suatu regional **lebih rendah** dibandingkan sektor yang sama di provinsi
- Untuk mempertajam analisis maka dilakukan analisis komparatif antara nilai LQ dengan nilai DLQ, dengan kriteria:
- ✓  $LQ>1$  dan  $DLQ>1$ : Lapangan usaha kategori Unggulan
  - ✓  $LQ>1$  dan  $DLQ<1$ : Lapangan usaha kategori Prospektif
  - ✓  $LQ<1$  dan  $DLQ>1$ : Lapangan usaha kategori Andalan
  - ✓  $LQ<1$  dan  $DLQ<1$ : Lapangan usaha kategori Terbelakang

**Tabel 6. 12 Hasil Perhitungan DLQ Kabupaten Sumbawa**

Lapangan Usaha	DLQ	Kesimpulan
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,00	Perkembangan lebih cepat
Pertambangan dan Penggalian	0,01	Perkembangan lebih lambat
Industri Pengolahan	5,48	Perkembangan lebih cepat
Pengadaan Listrik dan Gas	13,27	Perkembangan lebih cepat
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,65	Perkembangan lebih lambat
Konstruksi	0,90	Perkembangan lebih lambat
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,70	Perkembangan lebih cepat
Transportasi dan Pergudangan	-62,78	Perkembangan lebih lambat



Lapangan Usaha	DLQ	Kesimpulan
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	60,73	Perkembangan lebih cepat
Informasi dan Komunikasi	2,76	Perkembangan lebih cepat
Jasa Keuangan dan Asuransi	7,36	Perkembangan lebih cepat
Real Estate	0,85	Perkembangan lebih lambat
Jasa Perusahaan	5,96	Perkembangan lebih cepat
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,92	Perkembangan lebih cepat
Jasa Pendidikan	2,10	Perkembangan lebih cepat
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,25	Perkembangan lebih cepat
Jasa Lainnya	3,49	Perkembangan lebih cepat

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel di atas, di Kabupaten Sumbawa terdapat dua belas nilai DLQ lebih dari satu ( $DLQ > 1$ ) yakni **Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Industri Pengolahan; Sektor Pengadaan Listrik dan Gas; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Lainnya;** selain sektor/lapangan usaha tersebut, lainnya memiliki potensi perkembangan yang lebih lambat dibandingkan sektor/lapangan usaha yang sama di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

**Tabel 6. 13 Perbandingan Nilai LQ dan Nilai DLQ Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023**

Lapangan Usaha	Rata-Rata	DLQ	Kriteria
----------------	-----------	-----	----------



	LQ	LQ	DLQ
<b>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</b>	1,76	5,00	>1
<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	0,19	0,01	<1
<b>Industri Pengolahan</b>	0,48	5,48	<1
<b>Pengadaan Listrik dan Gas</b>	1,33	13,27	>1
<b>Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang</b>	0,60	0,65	<1
<b>Konstruksi</b>	1,33	0,90	>1
<b>Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor</b>	1,14	3,70	>1
<b>Transportasi dan Pergudangan</b>	0,57	- 62,78	<1
<b>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</b>	0,77	60,73	<1
<b>Informasi dan Komunikasi</b>	0,64	2,76	<1
<b>Jasa Keuangan dan Asuransi</b>	1,05	7,36	>1
<b>Real Estat</b>	0,65	0,85	<1
<b>Jasa Perusahaan</b>	1,34	5,96	>1
<b>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib</b>	1,04	2,92	>1
<b>Jasa Pendidikan</b>	1,01	2,10	>1
<b>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</b>	0,62	6,25	<1
<b>Jasa Lainnya</b>	0,78	3,49	<1

Berdasarkan analisis gabungan LQ dan DLQ diperoleh 4 kelompok lapangan usaha, yaitu kelompok lapangan usaha unggulan, andalan, prospektif dan terbelakang. Lapangan usaha unggulan merupakan sektor basis dan berpotensi untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian di masa kini dan masa yang akan datang, Lapangan usaha unggulan di Kabupaten Sumbawa adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pengadaan Listrik dan Gas; Perdagangan Besar dan



Eceran; Reparasi Mobil dan Motor; Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan . Lapangan usaha prospektif merupakan sektor basis pada masa sekarang namun menjadi sektor non basis pada masa yang akan datang, contohnya adalah sektor Konstruksi dan sebaliknya sektor andalan adalah sektor non basis pada masa sekarang namun dapat menjadi sektor basis pada masa yang akan datang, seperti sektor Industri Pengolahan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa Lainnya . Terakhir, lapangan usaha terbelakang/ tertinggal dimana sektor ini merupakan sektor non basis atau bukan sektor penggerak ekonomi baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Lapangan usaha yang termasuk sektor terbelakang yaitu Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Transportasi dan Pergudangan dan Real Estat.

**Tabel 6. 14 Matriks Analisis Komparatif Gabungan LQ dan DLQ**

Kriteria	DLQi > 1	DLQi < 1
LQi > 1	<b>LAPANGAN USAHA UNGGULAN:</b> 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2. Pengadaan Listrik dan Gas 3. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor 4. Jasa Keuangan dan Asuransi 5. Jasa Perusahaan 6. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 7. Jasa Pendidikan	<b>LAPANGAN USAHA PROSPEKTIF:</b> 1. Konstruksi
LQi < 1	<b>LAPANGAN USAHA ANDALAN:</b> 1. Industri Pengolahan 2. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3. Informasi dan Komunikasi 4. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	<b>LAPANGAN USAHA TERBELAKANG:</b> 1. Pertambangan dan Penggalian 2. Pengadaan Air, Pengolahan



Kriteria	DLQi > 1	DLQi < 1
	5. Jasa Lainnya	Sampah, Limbah dan Daur Ulang 3. Transportasi dan Pergudangan 4. Real Estat

## 6.6. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini) dan Pengeluaran per Kapita

### 1. Ketimpangan Pendapatan

Keberhasilan pembangunan ekonomi secara makro telah ditunjukkan dengan laju pertumbuhan yang terus meningkat dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan bahwa terdapat kemajuan dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Sumbawa. Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah tidak semata-mata dilihat dari tingginya pertumbuhan ekonomi saja, akan tetapi pembangunan ekonomi berhasil atau tidak dengan melihat apakah kenaikan laju pertumbuhan ekonomi yang terjadi tersebut menyentuh semua lapisan masyarakat atau berdampak kepada masyarakat berpendapatan rendah. Apabila kenaikan laju pertumbuhan ekonomi daerah tidak berdampak kepada masyarakat berpenghasilan rendah, maka akan terjadi kesenjangan ekonomi semakin tinggi di masyarakat, sehingga terjadi ketimpangan ekonomi, yang selanjutnya akan menimbulkan kecemburuan sosial semakin besar, akibatnya munculnya permasalahan sosial di daerah yang lebih luas seperti meningkatnya kemiskinan.

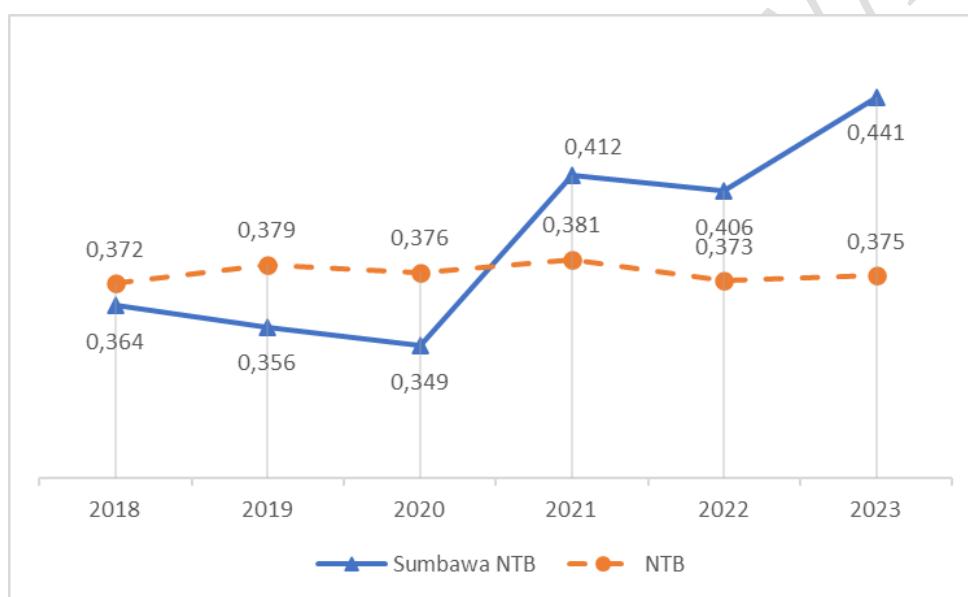
*Koefisien Gini* (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini didasarkan pada Kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Secara umum, nilai Gini Ratio Kabupaten Sumbawa selama periode 2017-2021 mengalami fluktuasi. Angka Gini Ratio Kabupaten Sumbawa ini dapat diinterpretasikan berdasarkan karakteristik Koefisien Gini bahwa Gini Ratio bernilai antara 0 sampai 1, dimana koefisien Gini =



0, berarti pembagian pendapatan merata sempurna, tetapi jika Koefisien Gini = 1, berarti pembagian pendapatan timpang sempurna.

Menurut kriteria H.T. Oshima: (1) Ketimpangan “rendah” bila angka Gini kurang dari 0,3; (2) Ketimpangan “sedang” bila indeks Gini antara 0,3-0,4;(3) Ketimpangan “tinggi” bila indeks Gini di atas 0,4. Berdasarkan hal tersebut, maka Gini Ratio Kabupaten Sumbawa termasuk dalam kategori “sedang”, yang berarti masih terjadi ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat dan perlu terus mendapat perhatian, sebagaimana tergambar sebagai berikut.



Gambar 6. 22 Perkembangan Gini Ratio di Kabupaten Sumbawa dan NTB Tahun 2019-2023  
Sumber Data: BPS Kabupaten Sumbawa

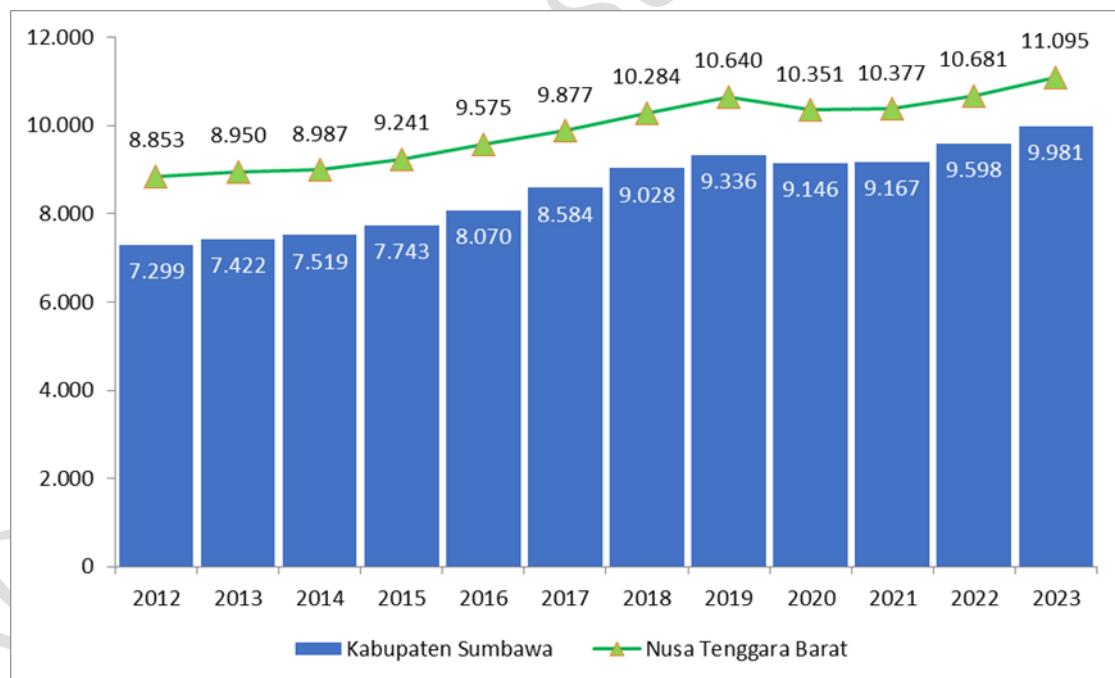
Data Gini Ratio menunjukkan bahwa Kabupaten Sumbawa dalam periode 2018-2023 mengalami fluktuasi tingkat ketidaksetaraan pendapatan yang signifikan, dengan nilai Gini berkisar antara 0,349 hingga 0,441, mencapai puncaknya pada tahun 2023. Ini mengindikasikan adanya ketidaksetaraan yang cukup mencolok dalam distribusi pendapatan atau kekayaan di Kabupaten Sumbawa. Di sisi lain, ketika dibandingkan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat secara keseluruhan, Kabupaten Sumbawa menunjukkan tingkat ketidaksetaraan yang lebih tinggi. Meskipun Provinsi Nusa Tenggara Barat juga mengalami fluktuasi kecil dalam rasio Gini dari tahun ke tahun, nilai-nilai ini cenderung lebih rendah daripada yang tercatat di Kabupaten Sumbawa. Hal ini



menunjukkan bahwa meskipun ada variasi, distribusi pendapatan atau kekayaan di wilayah lain di provinsi ini mungkin lebih merata atau setidaknya tingkat ketidaksetaraannya tidak sebesar yang terjadi di Kabupaten Sumbawa. Dengan demikian, Kabupaten Sumbawa memperlihatkan tingkat ketidaksetaraan yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Nusa Tenggara Barat, mencerminkan tantangan yang lebih besar dalam mencapai kesetaraan ekonomi di tingkat lokal.

## 2. Pengeluaran Per Kapita

Dimensi standar hidup layak dihitung melalui pendekatan pengeluaran per kapita. Rata-rata pengeluaran perkapaita setahun didapatkan dari data Susenas. Semakin besar pengeluaran mengindikasikan besarnya pula pendapatan yang merupakan cerminan kesejahteraan. Pengeluaran per kapita Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 6. 23 Pengeluaran per Kapita per Tahun Kabupaten Sumbawa Tahun 2012-2023  
Sumber: BPS Kab. Sumbawa

Pengeluaran per kapita di Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2023 sebesar 9.981 juta rupiah per tahun. Artinya, untuk memenuhi kebutuhan hidup pada Tahun 2023 rata-rata setiap penduduk di Kabupaten Sumbawa



harus mengeluarkan uang sebesar 9.981 juta rupiah per tahunnya, mengalami peningkatan sebesar 383 ribu rupiah dibandingkan dengan pengeluaran tahun sebelumnya. Bila dibandingkan dengan angka Provinsi NTB, angka pengeluaran untuk penduduk Sumbawa masih di bawah rata-rata masyarakat di NTB. Pengeluaran per kapita memiliki korelasi yang positif dengan pendapatan. Semakin besar pengeluaran per kapita penduduk menandakan pendapatan yang diterima semakin besar, yang berarti terdapat indikasi kualitas hidup penduduk juga semakin meningkat.

## 6.7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari:

### 1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah dikelompokkan sebagai berikut:

- a) Pendapatan asli daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- b) Pendapatan Transfer Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.
- c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang berasal dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

**Tabel 6. 15 Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023**

Tahun	Realisasi Pendapatan Daerah (Milyar Rp)	Pertumbuhan (Milyar Rp)	Persentase (%)
-------	---	-------------------------	----------------



Tahun	Realisasi Pendapatan Daerah (Miliar Rp)	Pertumbuhan (Miliar Rp)	Percentase (%)
2019	1.782,26	177,64	11,07
2020	1.630,12	-152,14	-8,54
2021	1.641,05	10,93	0,67
2022	1.685,40	44,35	2,70
2023	1.625,29	-33,11	-1,96
<b>Rata-rata per Tahun</b>	<b>9,53</b>		<b>0,79</b>

Sumber Data: BKAD Kab. Sumbawa

Dari tahun 2019 hingga 2023, pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa menunjukkan variasi yang signifikan. Pada tahun 2019, pendapatan mencapai 1.782,26 miliar Rupiah dengan pertumbuhan 177,64 miliar Rupiah atau 11,07 persen. Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 152,14 miliar Rupiah atau -8,54 persen, mengakibatkan pendapatan turun menjadi 1.630,12 miliar Rupiah. Pada tahun 2021, pendapatan meningkat sedikit sebesar 10,93 miliar Rupiah atau 0,67 persen, mencapai 1.641,05 miliar Rupiah. Tahun 2022 mencatat pertumbuhan sebesar 44,35 miliar Rupiah atau 2,70 persen, dengan total pendapatan 1.685,40 miliar Rupiah. Namun, pada tahun 2023, pendapatan menurun sebesar 33,11 miliar Rupiah atau -1,96 persen, dengan total pendapatan 1.652,29 miliar Rupiah. Rata-rata pertumbuhan per tahun selama periode ini adalah 9,53 miliar Rupiah atau 0,79 persen. Fluktuasi ini mencerminkan tantangan ekonomi yang dihadapi oleh Kabupaten Sumbawa selama beberapa tahun terakhir, dengan pemulihan dan stabilitas pendapatan daerah yang harus terus diperhatikan untuk masa depan.

**Tabel 6. 16 Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2023**



URAIAN	Target Pendapatan 2023	Realisasi Pendapatan 2023	Percentase Realisasi (%)
Pendapatan Pajak Daerah	78.074.934.520,00	45.368.887.046,54	58,11
Hasil Retribusi Daerah	13.449.623.440,00	10.412.774.136,00	77,42
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.826.384.273,00	14.826.384.273,00	100,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	123.192.762.494,00	101.568.369.617,21	82,45
<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>229.543.704.727,00</b>	<b>172.176.415.072,75</b>	<b>75,01</b>

Sumber Data: BKAD Kab. Sumbawa

Pada tahun 2023, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 75,01 persen dari target yang ditetapkan sebesar 229.543.704.727,00 Rupiah, dengan realisasi sebesar 172.176.415.072,75 Rupiah. Meskipun terdapat beberapa komponen yang belum mencapai target, seperti Pajak Daerah yang hanya tercapai 58,11 persen, dan Retribusi Daerah dengan realisasi 77,42 persen, pencapaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mencapai 100 persen, menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan aset daerah. Selain itu, Lain-lain PAD yang Sah berhasil mencapai 82,45 persen dari target, mencerminkan potensi yang baik dalam sektor ini. Hal ini memberikan kesempatan untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan strategi pengumpulan pajak dan retribusi di masa depan, serta memperkuat upaya untuk meningkatkan kontribusi PAD secara keseluruhan.

**Tabel 6. 17 Perbandingan Target dan Realisasi Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2023**

URAIAN	Target Pendapatan 2023	Realisasi Pendapatan 2023	Percentase Realisasi (%)
Tranfer Pemerintah	1.666.512.168.531,00	1.622.759.584.962,00	97,37



URAIAN	Target Pendapatan 2023	Realisasi Pendapatan 2023	Persentase Realisasi (%)
<b>Pusat</b>			
Dana Perimbangan	1.502.861.651.531,00	1.459.109.067.962,00	97,09
Dana Insentif Daerah (DID)	11.447.687.000,00	11.447.687.000,00	100,00
Dana Desa	152.202.830.000,00	152.202.830.000,00	100,00
<b>Transfer Antar Daerah</b>	95.010.132.085,00	81.916.558.130,00	86,22
Pendapatan Bagi Hasil	94.162.165.085,00	81.916.558.130,00	87,00
Bantuan Keuangan	847.967.000,00	0,00	0,00
<b>Pendapatan Tranfer</b>	1.761.522.300.616,00	1.704.676.143.092,00	96,77

Sumber Data: BKAD Kab. Sumbawa

Pada tahun 2023, pendapatan transfer dari berbagai sumber menunjukkan hasil yang positif, meskipun ada beberapa area yang perlu perhatian. Transfer Pemerintah Pusat mencapai 97,37 persen dari target sebesar 1.666.512.168.531,00 Rupiah, dengan realisasi 1.622.759.584.962,00 Rupiah. Dana Perimbangan juga hampir mencapai target dengan persentase realisasi 97,09 persen. Kinerja yang sangat baik ditunjukkan oleh Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa, keduanya mencapai 100 persen dari target yang ditetapkan, menandakan keberhasilan dalam pengelolaan dana tersebut. Di sisi lain, Transfer Antar Daerah dan Pendapatan Bagi Hasil masih di bawah target, masing-masing mencapai 86,22 persen dan 87,00 persen. Sementara itu, Bantuan Keuangan belum terealisasi, menunjukkan tantangan dalam sektor ini. Secara keseluruhan, total Pendapatan Transfer berhasil mencapai 96,77 persen dari target, mencerminkan pengelolaan yang



efisien dan adanya ruang untuk meningkatkan strategi dalam pengumpulan dan distribusi dana transfer di masa mendatang.

**Tabel 6. 18 Perbandingan Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2023**

URAIAN	Target Pendapatan 2023	Realisasi Pendapatan 2023	Persentase (%) Realisasi
Pendapatan Hibah	36.380.100.000,00	28.654.298.098,00	78,76
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	208.800.000,00	0,00
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>36.380.100.000,00</b>	<b>28.863.098.098,00</b>	<b>79,34</b>

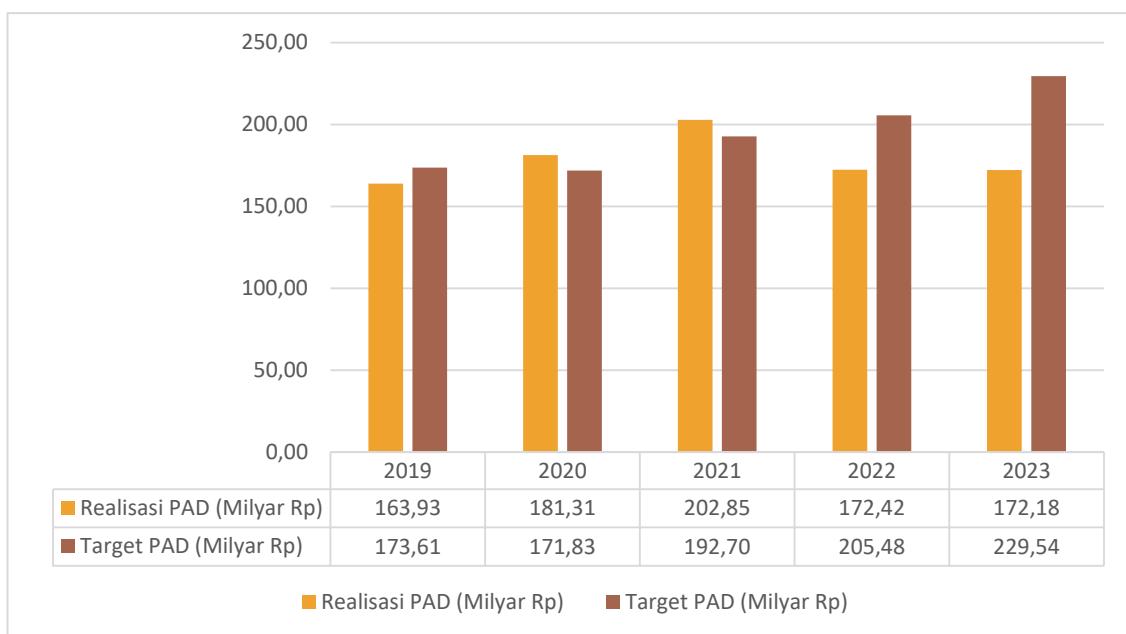
Sumber Data: BKAD Kab. Sumbawa

Pada tahun 2023, pendapatan hibah tercatat mencapai 28.654.298.098,00 Rupiah, atau 78,76 persen dari target yang ditetapkan sebesar 36.380.100.000,00 Rupiah. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target, pencapaian ini menunjukkan upaya yang baik dalam memperoleh dana hibah. Di sisi lain, kategori "Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan" menunjukkan realisasi yang tidak terduga, dengan penerimaan sebesar 208.800.000,00 Rupiah meskipun tidak ada target yang ditetapkan. Untuk kategori Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, realisasi sebesar 28.863.098.098,00 Rupiah mencerminkan 79,34 persen dari target.

Pendapatan asli daerah yang dicapai secara umum menunjukkan kemajuan aktivitas perekonomian pada masyarakat yang dapat dijadikan obyek pungut dan merupakan faktor penting dalam menilai laju pembangunan di daerah. Oleh karena itu pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah harus dipacu pertumbuhannya. Perkembangan target dan realisasi pendapatan asli daerah pada



Kabupaten Sumbawa selama tahun 2019 s.d. 2023 disajikan pada Gambar 6.24.



**Gambar 6. 24 Perkembangan Target dan Realisasi PAD Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023**  
Sumber Data: BKAD Kab. Sumbawa

Dalam periode 2019 hingga 2023, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan fluktuasi dalam pencapaian terhadap target yang ditetapkan. Pada tahun 2019, realisasi PAD sebesar 163,93 miliar Rupiah atau sedikit di bawah target 173,61 miliar Rupiah. Tahun 2020 menunjukkan peningkatan, dengan realisasi PAD sebesar 181,31 miliar Rupiah, melampaui target 171,83 miliar Rupiah. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2021, dengan realisasi PAD mencapai 202,85 miliar Rupiah, melebihi target 192,70 miliar Rupiah. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, realisasi PAD tidak mencapai target yang ditetapkan. Tahun 2022 mencatat realisasi 172,42 miliar Rupiah dari target 205,48 miliar Rupiah, sementara pada 2023 realisasi mencapai 172,18 miliar Rupiah, atau hanya 75 persen dari target sebesar 229,54 miliar Rupiah.

Pertumbuhan realisasi pendapatan asli daerah selama tahun 2019 s.d. 2023 disajikan pada Tabel 6.19

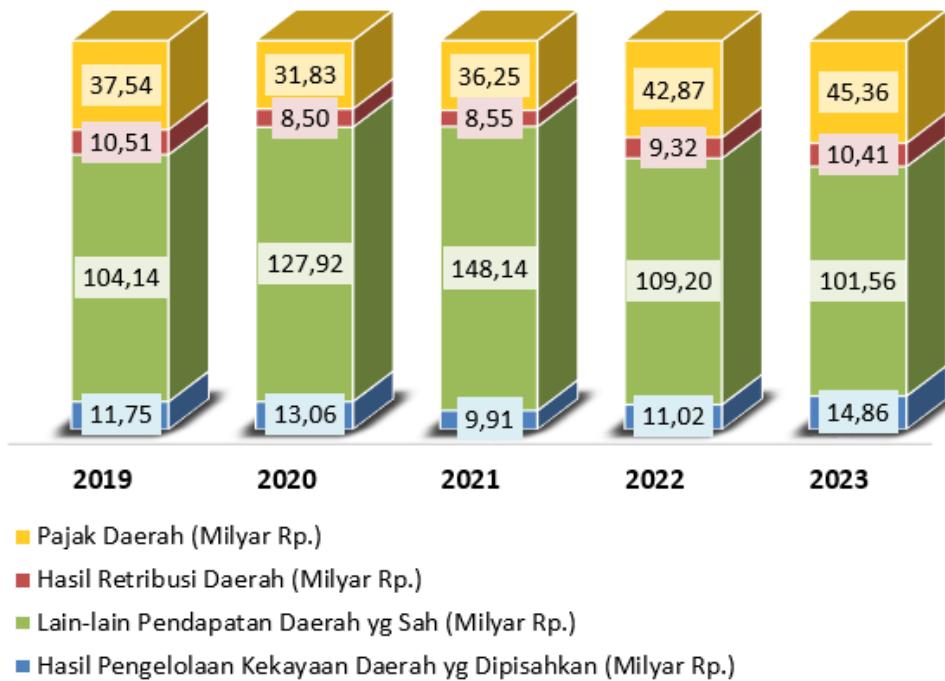
**Tabel 6. 19 Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023**

Tahun	Realisasi PAD (Miliar Rp)	Pertumbuhan (Miliar Rupiah)	Persentase (%)
2019	163,93	19,99	13,89
2020	181,31	17,38	10,60
2021	202,85	21,54	11,88
2022	172,42	-30,43	-15,00
2023	172,18	-0,24	-0,14
<b>Rata-rata per Tahun</b>		<b>5,65</b>	<b>4,25</b>

Sumber Data: BKAD Kab. Sumbawa

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan capaian yang patut diapresiasi, terutama pada tahun 2021 di mana PAD mencapai puncak pertumbuhan sebesar 21,54 miliar Rupiah (11,88 persen). Meskipun terjadi penurunan di tahun 2022, langkah-langkah mitigasi yang diambil berhasil menahan penurunan lebih lanjut, terbukti dengan stabilnya realisasi PAD di tahun 2023 dengan hanya sedikit penurunan sebesar 0,24 miliar Rupiah (-0,14 persen). Secara keseluruhan, rata-rata pertumbuhan PAD per tahun sebesar 5,65 miliar Rupiah dan persentase rata-rata 4,25 persen mengindikasikan bahwa Kabupaten Sumbawa memiliki potensi pertumbuhan yang baik.

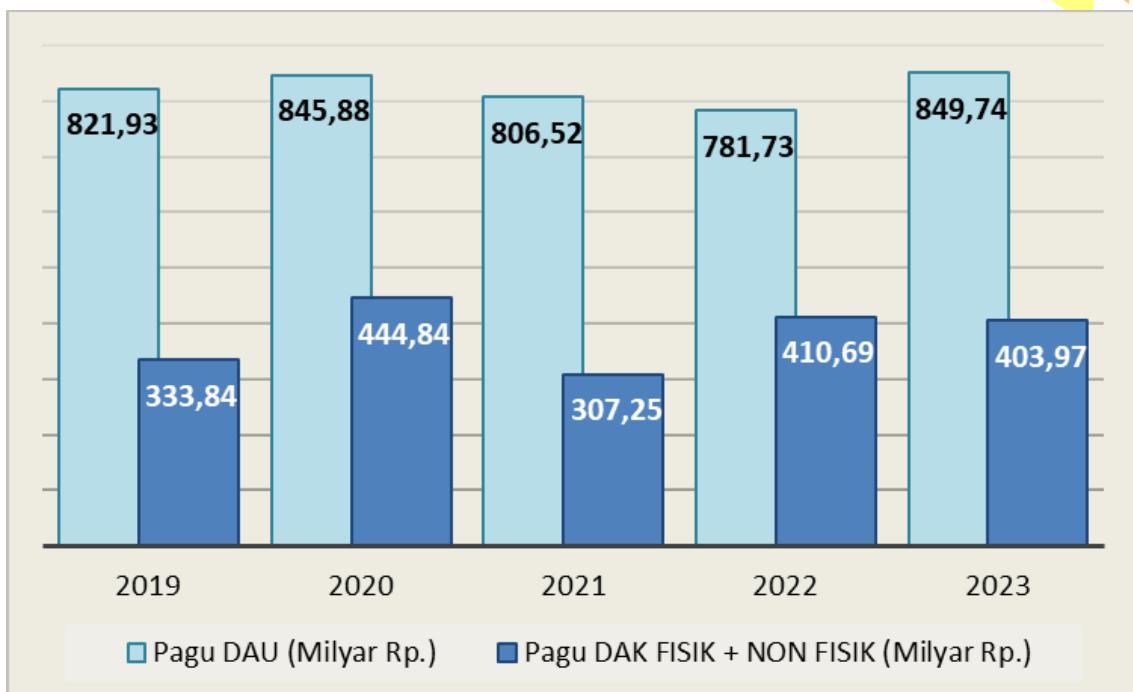
Distribusi realisasi pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan alam yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2023 ditampilkan pada Gambar 6.25.



Gambar 6. 25 Distribusi PAD Kabupaten Sumbawa Tahun 2023

Sumber Data: BKAD Kab. Sumbawa

Pada tahun 2023, kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang menyumbang 58,99 persen dari total PAD dengan 101.568.369.617,21 Rupiah. Pajak Daerah berkontribusi sebesar 26,35 persen, yaitu 45.368.887.046,54 Rupiah. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memberikan kontribusi 8,61 persen dengan 14.826.384.273,00 persen, dan Hasil Retribusi Daerah menyumbang 6,05 persen dengan 10.412.774.136,00 Rupiah. Persentase ini menunjukkan dominasi pendapatan dari kategori lain-lain yang sah, sementara komponen lainnya tetap memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung total PAD.



Gambar 6. 26 Perkembangan Komponen Dana Perimbangan (DAK dan DAU)  
Sumber Data: Bappeda Kab. Sumbawa

Dana Perimbangan adalah salah satu mekanisme yang digunakan oleh pemerintah pusat untuk mendukung keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia. Dana ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah, serta antara daerah yang satu dengan yang lain. Selama tahun 2019-2023 pendapatan dana perimbangan sebagai sumber pendapatan daerah terbesar dengan angka persentase kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah di atas 60% dan di tahun 2023 mencapai 76,56%. Kontribusi dana perimbangan sebagai sumber utama pendapatan daerah ini harus didukung dengan pengelolaan yang efektif dan tepat sasaran demi pembangunan daerah.

Salah dua jenis dana perimbangan adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sesuai namanya DAK bersifat spesifik yang hanya mendanai kegiatan prioritas nasional di daerah yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik, sementara DAU tidak terikat pada program atau kegiatan tertentu. Alokasi DAU dan DAK setiap tahunnya bersifat fluktuatif dimana pada tahun 2023 DAU dan DAK dianggarkan seperti pada gambar



6.26 dengan masing-masing realisasi sebesar Rp. 854.640.794.226,00 dan Rp. 384.587.034.035. Realisasi DAU meningkat sebesar 9,54% dibanding tahun 2022 sedangkan realisasi DAK (fisik dan nonfisik) menurun sebesar 0,60% dibanding tahun 2022.

## 2. Belanja Daerah

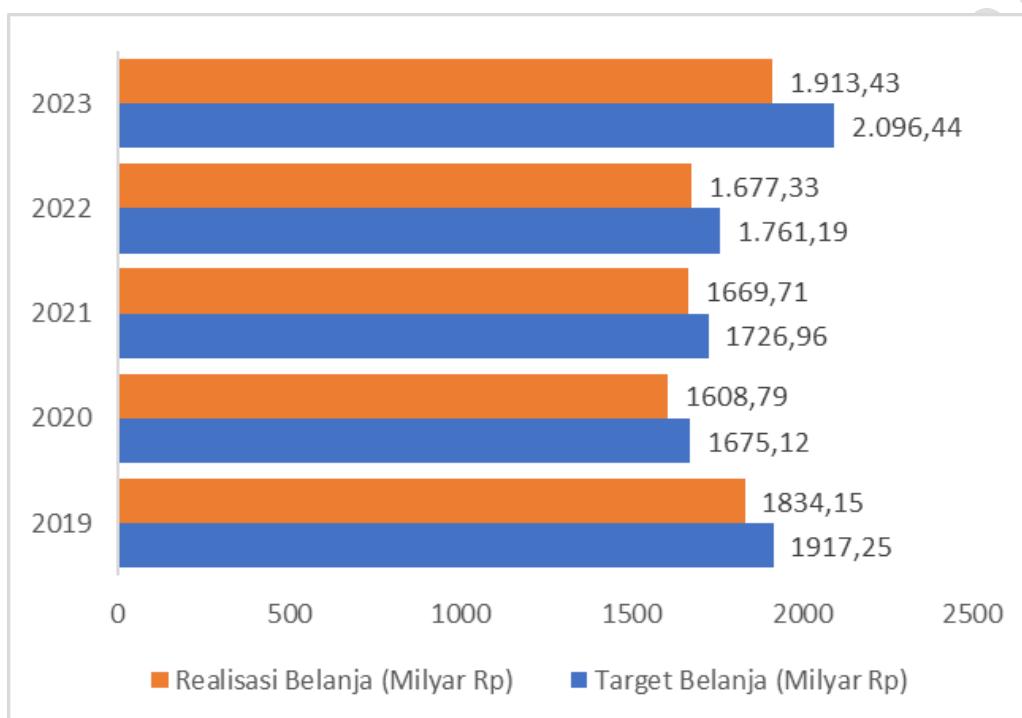
Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah dikelompokkan menjadi empat yaitu:

1. Belanja operasi, yaitu Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja subsidi, belanja hibah dan bantuan sosial;
2. Belanja modal, yaitu Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria: a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; b. digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan c. batas minimal kapitalisasi aset tetap; d. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada;
3. Belanja tidak terduga, yaitu pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2021 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.



4. Belanja Transfer, yaitu pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis belanja bagi hasil belanja, belanja bantuan keuangan.

Gambaran kinerja belanja daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa selama tahun 2019-2023 disajikan pada Gambar 6.27.



**Gambar 6. 27 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa**  
Sumber Data: BKAD Kab. Sumbawa

Data realisasi dan target belanja Kabupaten Sumbawa dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada tahun 2019, realisasi belanja tercatat sebesar Rp 1.834,15 miliar, mendekati target Rp 1.917,25 miliar. Pada tahun 2020, terjadi penurunan realisasi menjadi Rp 1.608,79 miliar, jauh di bawah target Rp 1.675,12 miliar. Namun, pada tahun 2021, realisasi belanja meningkat menjadi Rp 1.669,71 miliar, tetapi masih belum mencapai target Rp 1.726,96 miliar. Tahun 2022 mencatat realisasi belanja sebesar Rp 1.677,33 miliar, yang juga tidak memenuhi target Rp 1.761,19 miliar. Di tahun 2023, realisasi belanja meningkat signifikan menjadi Rp 1.913,43 miliar, mendekati target



Rp 2.096,44 miliar. Peningkatan belanja di tahun 2023 menunjukkan upaya positif dalam pengelolaan anggaran dan perencanaan keuangan daerah, meskipun perlu adanya evaluasi untuk mencapai target yang ditetapkan di tahun-tahun sebelumnya.

**Tabel 6. 20 Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2023**

Tahun	Realisasi Belanja Daerah (Miliar Rp)	Pertumbuhan (Miliar Rp)	Percentase (%)
2019	1.834,15	149,94	8,90
2020	1.608,78	-225,37	-12,29
2021	1.669,71	60,93	3,79
2022	1.676,89	7,62	0,46
2023	1.677,33	0,44	0,03
Rata-rata per Tahun	1.693,37	-1,38	0,17

Sumber Data: BKAD Kab. Sumbawa

Perbandingan antara belanja daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun 2022 dan 2023 menurut kelompok belanja daerah disajikan pada Tabel 6.21 berikut:

**Tabel 6. 21 Perbandingan Belanja Daerah Menurut Kelompok Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 dan Tahun 2023**

NO	URAIAN	*) dalam Miliar Rp.			Percentase Realisasi (%)	Kenaikan/ Penurunan (%)
		Anggaran Tahun 2023*	Realisasi Tahun 2023*	Realisasi Tahun 2022*		
1	BELANJA OPERASI	1.524,91	1.374,22	1.220,98	90,12	12,55
1.1	Belanja Pegawai	849,31	757,66	723,23	89,21	4,76



NO	URAIAN	*) dalam Miliar Rp.			Percentase Realisasi (%)	Kenaikan/Penurunan (%)
		Anggaran Tahun 2023*	Realisasi Tahun 2023*	Realisasi Tahun 2022*		
1.2	Belanja Barang dan Jasa	588,11	540,07	443,44	91,83	21,79
1.3	Belanja Bunga	4,57	4,57	-	99,98	-
1.4	Belanja Hibah	81,10	70,11	50,41	86,45	39,09
1.5	Belanja Bantuan Sosial	1,80	1,80	3,88	100,00	-53,63
2	BELANJA MODAL	279,54	260,68	200,54	93,25	29,98
2.1	Belanja Modal Tanah	55,33	55,33	2,68	100,00	1.963,10
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60,91	51,22	62,03	84,09	-17,43
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55,01	52,50	36,36	95,44	44,39
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	103,22	96,79	96,59	93,76	0,21
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5,06	4,83	2,87	95,51	67,93
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	9,37	6,69	13,63	71,42	-50,89
3.1	Belanja Tidak Terduga	9,37	6,69	13,63	71,42	-50,89
4	BELANJA TRANSFER	282,60	271,82	242,16	96,19	12,25
4.1	Belanja Bagi Hasil	7,83	7,83	5,80	100,00	35,12
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	274,76	263,98	236,36	96,08	11,69
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.096,43</b>	<b>1.913,43</b>	<b>1.677,33</b>	<b>91,27</b>	<b>14,08</b>

Sumber Data: BKAD Kab. Sumbawa

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Defisit APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan



defisit, didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus atau defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, dapat dikenai sanksi penundaan penyaluran dana transfer umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah terdiri dari sebagai berikut:

1. Penerimaan pembiayaan daerah mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (Silpa), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah;
2. Pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2021 diutamakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun anggaran



sebelumnya dan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Perbandingan anggaran dan realisasi pembiayaan daerah pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun 2022 dan 2023 disajikan pada Tabel 6.22.

**Tabel 6. 22 Perbandingan Anggaran Dan Realisasi Pembiayaan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Selama Tahun 2022 dan 2023**

URAIAN	*) dalam Miliar Rp.			Percentase (%) Realisasi	Kenaikan / Penurunan (%)
	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022		
<b>SURPLUS/ DEFISIT</b>	(68,99)	(7,71)	8,07	11,18	-195,53
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	68,99	63,79	26,96	92,47	136,60
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	93,11	87,67	26,96	94,15	225,18
<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya</b>	35,04	35,04	26,96	100,00	29,97
<b>Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan</b>	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Penerimaan Pinjaman Daerah</b>	55,00	52,63	0,00	95,69	
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	24,12	23,87	0,00	98,96	
<b>Penyertaan Modal Pemda</b>	2,88	2,63	0,00	91,32	
<b>Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang</b>	21,24	21,24	0,00	100,00	



URAIAN	*) dalam Milyar Rp.			Percentase (%) Realisasi	Kenaikan / Penurunan (%)
	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022		
<b>Jatuh Tempo</b>					
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	68,99	63,79	26,96	92,47	136,60

Sumber Data: BKAD Kab. Sumbawa

PROFIL DAERAH SUMBAWA 2024